



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦢꦺꦑꦏ

LAPORAN INSTANSI PEMERINTAH

KAPANEWON DEPOK TAHUN 2025

2026



*Ikhlas
Nglayani
Lan
Ngrampung*



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
BerAKHLAK adalah sikap dan perilaku yang baik, jujur, adil, dan bertanggung jawab.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kapanewon Depok Kabupaten Sleman merupakan wujud pertanggungjawaban tentang pelaksanaan program dan kegiatan di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2025.

LKjIP ini merupakan laporan hasil pelaksanaan kinerja yang telah direncanakan pada awal tahun yang merupakan hasil penjabaran dari Perjanjian Kinerja antara Panewu Depok dengan Bupati Sleman. LKjIP Kapanewon Depok Tahun 2025 menjabarkan akuntabilitas kinerja mengacu kepada Renstra Kapanewon Depok tahun 2021 – 2026 dan Rentsra tahun 2025-2029.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan LKjIP Tahun 2025 Kapanewon Depok dan apabila ada kekurangan dalam laporan ini kami mohon kritik/saran agar laporan bisa tersusun dengan baik dan atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Depok, 13 Februari 2026

Panewu Depok,



DJOKO MULJANTO, S.P.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19680327 199803 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vii
Ikhtisar Eksekutif	viii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Profil Singkat Kapanewon Depok	1
1.2. Isu Strategis	4
BAB II Perencanaan Kinerja	7
2.1. Perencanaan Strategis Tahun 2025	7
2.2. Indikator Kinerja Utama	11
2.3. Perjanjian Kinerja	11
BAB III Akuntabilitas Kinerja	13
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025	13
3.1.1. Realisasi Indikator Kinerja Utama	14
3.1.2. Realisasi Perjanjian Kinerja	16
3.2 Analisis Pengukuran Kinerja Utama	18
3.2.1. Perhitungan Dalam Pengukuran Kinerja	18
3.2.2. Pengukuran Kinerja IKU dan Perjanjian Kinerja	19
3.2.2.1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat	19
3.2.2.2. Indikator Akuntabilitas Instansi Pemerintah	22
3.2.2.3. Indikator Kelurahan dengan Predikat Cepat Berkembang	26
Indikator Cakupan Gangguan Ketentraman dan ketertiban yang ditangani di Wilayah Kapanewon	29
3.2.2.5. Persentase Penanganan Permasalahan yang terkait Isu SARA	37
3.3 Analisis Efisiensi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan Sasaran	40
3.4 Analisis Program/Kegiatan	44
3.5 Capaian Kinerja atas Tema Prioritas Nasional "Pengentasan Kemiskinan"	58
BAB IV Penutup	60
4.1. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2025	60
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025	60

4.2.1 Tindak Lanjut LHE Kemenpan RB	60
4.2.2 Tindak Lanjut LHE Inspektorat Kabupaten	61
Langkah Kapanewon Depok Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Masa Mendatang	62

Lampiran

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target Pada RKPD-P Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Pada Renstra 2021-2026

Daftar Prestasi TAHUN 2025

Matrik Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Pernyataan pada Renstra Kapanewon Depok Tahun 2021-2026	7
Tabel 2.2	Tabel Pernyataan Tujuan pada Renstra Kapanewon Depok 2021-2026	8
Tabel 2.3	Tabel Perubahan Target Kinerja Kapanewon Depok Tahun 2025	10
Tabel 2.4	Tabel Target dan Perubahan atas Target Indikator Kinerja Utama Kapanewon Depok Tahun 2025	11
Tabel 2.5	Tabel Perjanjian Kinerja Kapanewon Depok	11
Tabel 3.1	Daftar Indikator Kinerja Utama Kapanewon Depok	14
Tabel 3.2	Rincian Data Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kapanewon Depok	15
Tabel 3.3	Rekapitulasi Realisasi IKU dan Perjanjian Kinerja Kapanewon Depok Tahun 2025	17
Tabel 3.4	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 Berdasarkan Target Jangka Menengah	19
Tabel 3.5	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 Berdasarkan Perubahan atas Target Tahun 2026	19
Tabel 3.6	Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2025	20
Tabel 3.7	<i>Benchmarking</i> Capaian IKM Kapanewon Depok dan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2025	20
Tabel 3.8	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2025 berdasarkan Target Jangka Menengah	23
Tabel 3.9	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2024 berdasarkan Perubahan atas Target Tahun 2025	23
Tabel 3.10	Rekapitulasi Capaian Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2021-2025	23
Tabel 3.11	<i>Benchmarking</i> Capaian Indikator AKIP Kapanewon Depok, Mlati, Kalasan, Kabupaten Sleman dan Pemda DIY Tahun 2025	24
Tabel 3.12	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kelurahan Berpredikat Cepat Berkembang Tahun 2025 berdasarkan Target Jangka Menengah	26

Tabel 3.13	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kalurahan Berpredikat Cepat Berkembang Tahun 2025 berdasarkan perubahan atas Target Tahun 2026	26
------------	--	----

Tabel 3.14	Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Jumlah Kalurahan Cepat Berkembang Tahun 2021-2025	27
Tabel 3.15	Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Jumlah Kalurahan Cepat Berkembang Tahun 2021-2025	27
Tabel 3.16	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Cakupan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Wilayah Kapanewon Depok Tahun 2025 berdasarkan Target Jangka Menengah	30
Tabel 3.17	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Cakupan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Wilayah Kapanewon Depok Tahun 2025 berdasarkan Perubahan atas Target Tahun 2026	30
Tabel 3.18	Rekapitulasi Capaian Kinerja Cakupan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani di Wilayah Kapanewon Tahun 2021-2025	30
Tabel 3.19	Perbandingan Capaian Indikator Cakupan Gannguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani pada Kapanewon Depok, Mlati dan Kalasan Tahun 2021-2025	31
Tabel 3.20	Daftar Aduan terkait Ketentraman dan ketertiban beserta tindak lanjut pada Kapanewon Depok Tahun 2025	32
Tabel 3.21	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Penanganan Permasalahan yang terkait isu SARA Tahun 2025 berdasarkan Target Jangka Menengah	38
Tabel 3.22	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Penanganan Permasalahan yang terkait isu SARA Tahun 2025 berdasarkan Perubahan atasTarget Tahun 2026	38
Tabel 3.23	Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator Persentase Penanganan Permasalahan yang terkait Isu SARA Tahun 2021-2025	38
Tabel 3.24	Perbandingan Capaian Indikator Persentase Penanganan Permasalahan yang terkait Isu SARA pada Kapanewon Depok, Mlati dan Kalasan Tahun 2021-2025	39
Tabel 3.25	Realisasi Anggaran Berdasarkan Tujuan dan sasaran	40
Tabel 3.26	Tabel Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	44
Tabel 3.27	Tabel Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	49
Tabel 3.28	Tabel Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	52
Tabel 3.29	Tabel Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	53
Tabel 3.30	Tabel Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	55

Tabel 3.31	Tabel Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	57
Tabel 4.1	Tindak Lanjut Evaluasi Akuntabilitas Tahun 2025	60
Tabel 4.2	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Depok Tahun 2025	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Susunan Organisasi kapanewon Depok	2
Gambar 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	3
Gambar 1.3.	Komposisi Pegawai Kapanewon Depok Berdasarkan Golongan	3
Gambar 1.4	Komposisi Pegawai Kapanewon Depok Berdasarkan Jenjang Pendidikan	4
Gambar 3.1	Perbandingan Capaian IKM Kapanewon Depok dengan beberapa Instansi terkait	20
Gambar 3.2	Penyerahan Gisa Award oleh Bupati Sleman Kepada Kapanewon Depok sebagai Juara II Pada Tahun 2025 dan Pembinaan Kader Gisa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	21
Gambar 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Predikat AKIP Kapanewon Depok, Mlati, Kalasan, Kabupaten Sleman dan Pemda DIY	24
Gambar 3.4	Kapanewon Depok kembali Terpilih Sebagai Juara I dalam Evaluasi Kinerja Kapanewon Tahun 2024	25
Gambar 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator jumlah Kalurahan dengan Predikat cepat berkembang pada Kapanewon Depok, Mlati dan Kalasan	27
Gambar 3.6	Grafik Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi Epdeskel pada Kalurahan di Kapanewon Depok	28
Gambar 3.7	Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	28
Gambar 3.8	Diagram Perbandingan Capaian Kinerja Cakupan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani di wilayah Kapanewon Depok, Mlati dan Kalasan	31
Gambar 3.9	Tindak Lanjut Aduan Pembakaran Sampah dan Penertiban Baliho dan Spanduk di Wilayah Kapanewon Depok	36
Gambar 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja Presentase Penanganan Permasalahan yang terkait Isu SARA/Konflik Sosial pada Kapanewon Depok, Mlati, Kalasan dan Kabupaten Sleman Tahun 2025	39

Gambar 3.11	Pemantauan Jelang Lebaran dalam Rangka Cipta Kondusif di wilayah Kapanewon Depok	39
-------------	---	----

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kapanewon Depok memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan oleh Kapanewon Depok dalam tahun 2025. Diformulasikan dari hasil kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. LKjIP sebagai ikhtisar, disusun untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kapanewon Depok dimaksud, LKjIP ini disusun dengan tujuan tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri atas kinerja Kapanewon Depok dalam rangka peningkatan kinerja pada masa mendatang.

LKjIP Kapanewon Depok tahun 2025 memuat informasi tentang tahun terakhir penyelenggaraan pemerintahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2021, dan sekaligus tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 51 Tahun 2025.

Akuntabilitas Kinerja yang diinformasikan memuat hasil pengukuran kinerja dengan membandingkan antara rencana/target IKU dan Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasi kinerjanya sebagai berikut:

- a. periode 2021-2026 (PERIODE A) sebanyak 4 (empat) sasaran yang terdiri dari 5 (lima) Indikator kinerja dengan realisasi kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja tahun 2025 meliputi: capaian kinerja $\geq 95\%$ sebanyak 4 (empat) tujuan/sasaran atau 1 (satu) tujuan sasaran dengan capaian kinerja 100,72%
- b. periode 2025-2029 (PERIODE B) sebanyak 2 sasaran yang terdiri dari 3 indikator kinerja dengan realisasi kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja tahun 2025 meliputi: Capaian kinerja $\geq 100\%$ sebanyak 1(satu) tujuan, 1 (satu) sasaran dan capaian kinerja $>95\%$ sebanyak 1 (satu) sasaran

Pengukuran kinerja juga membandingkan (*benchmarking*) antara data capaian

kinerja tahun 2025 dalam periode RPJMD 2021-2026 dan RPJMD periode 2025-2029 dengan data capaian kinerja dari kabupaten/kota di wilayah DIY, capaian kinerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan data capaian kinerja Nasional, sepanjang datanya tersedia.

Dalam LKjIP ini kami sampaikan uraian Program yang mendukung Tujuan/Sasaran, realisasi anggaran, faktor yang memengaruhi capaian kinerja baik capaian tujuan/sasaran maupun capaian indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam PK berdasarkan Rencana Strategis periode tahun 2021-2026 dan periode tahun 2025-2029, beserta bukti pendukung berupa dokumentasi atas kegiatan dan prestasi yang berhasil diperoleh.

Analisis efisiensi yang dilakukan dalam LKjIP ini menghasilkan data bahwa sebanyak empat dari empat tujuan/sasaran tercapai efisien secara keseluruhan, atau sebesar 100% dari keseluruhan tujuan/sasaran.

Keberhasilan capaian kinerja ini mendapat dukungan dengan adanya regulasi dalam pemutakhiran SOP (*Standar Operating Procedure*) secara berkala sebagai upaya peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik. Selain itu, adanya inisiasi kebijakan terkait peningkatan hubungan kerja sama yang baik dari segenap aparatur kapanewon, para pemangku kepentingan baik di tingkat kalurahan, kapanewon maupun Pemerintah Daerah serta penguatan dukungan/partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap program dan kegiatan yang terselenggara di lingkungan kapanewon. Perbaikan sarana dan prasarana yang memadai juga terus ditingkatkan guna mendukung tugas-tugas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Implementasi inovasi-inovasi yang telah dibuat oleh Kapanewon Depok masih terus dijalankan sejak tahun 2022 karena membawa dampak positif dalam percepatan pelayanan sehingga kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik Kapanewon Depok semakin optimal.

Selanjutnya, rekomendasi sebagaimana disampaikan dalam Lembar Hasil Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, telah ditindaklanjuti dengan berkelanjutan, termasuk direncanakan untuk dilaksanakan dalam tahun 2026.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. PROFIL SINGKAT KAPANEWON DEPOK

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 24 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kapanewon, bahwa Kapanewon Depok merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kewilayahan, sub urusan kecamatan, yang dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi (nama perangkat daerah) terdiri dari:

1. Panewu;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
3. Jawatan Keamanan;
4. Jawatan Umum;
5. Jawatan Sosial;
6. Jawatan Kemakmuran; dan
7. Jawatan Praja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 24 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Depok mempunyai fungsi:

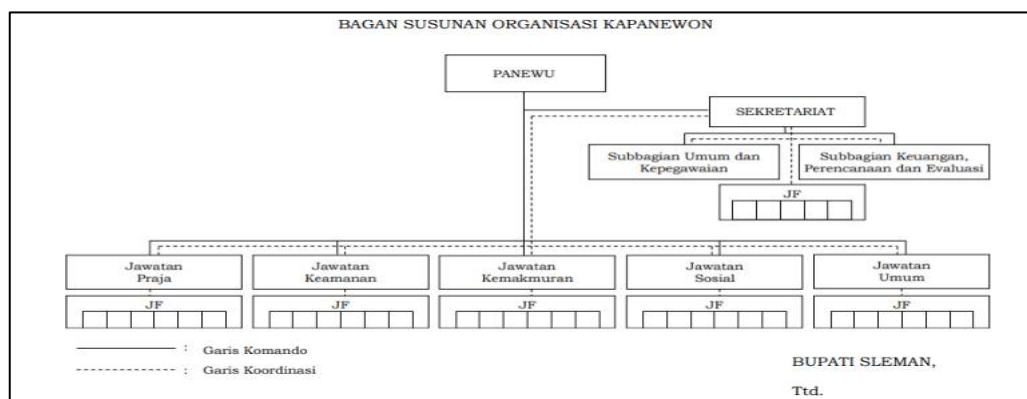
- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di Kapanewon;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Kalurahan;

- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kapanewon;
- f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- h. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;
- i. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- j. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- k. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
- l. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati;
- m. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. STRUKTUR ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, diatur dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon, maka susunan organisasi Kapanewon Depok sebagai berikut :

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Depok



B. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Depok. Komposisi jumlah pegawai di Kapanewon Depok periode 31 Desember 2025 berjumlah 28 (dua puluh delapan) ASN. Berdasarkan jenis kelamin terdapat 15 (lima belas) pegawai laki-laki dan 13 (tiga belas) pegawai perempuan. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin ini terlihat pada gambar 1.2 sebagai berikut:

Gambar: 1.2 Komposisi Pegawai Kapanewon Depok Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah pegawai berdasarkan golongannya terbagi menjadi 4 (empat) orang golongan IV, 20 (duapuluh) orang golongan III, tidak ada golongan II, sementara ada 1 (satu) orang golongan VII (PPPK) dan 3 (tiga) orang golongan V (PPPK). Komposisi pegawai berdasarkan golongan terlihat pada gambar 1.3 sebagai berikut:

Gambar: 1.3 Komposisi Pegawai Kapanewon Depok Berdasarkan Golongan



Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan, terdapat 7 (tujuh) pegawai berpendidikan S2, 15 (limabelas) pegawai berpendidikan S1, 2 (dua) pegawai berpendidikan D3, dan 4 (empat) pegawai berpendidikan SMA/SLTA. Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan terlihat pada gambar 1.4 sebagai berikut:

Gambar: 1.4
Komposisi Pegawai Kapanewon Depok
Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Jumlah pegawai berdasarkan jabatan menunjukkan bahwa terdapat 18 (delapan belas) pegawai pada jabatan Fungsional Umum, 9 (sembilan) pegawai pada jabatan Struktural, dan 1 (satu) pegawai pada jabatan Fungsional. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan tersebut sebagaimana terlihat pada Gambar 1.5 menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada jabatan Fungsional Umum dibandingkan dengan jabatan lainnya. gambar: 1. 5

Gambar: 1. 5
Komposisi Pegawai Kapanewon Depok
Berdasarkan Jabatan



1.2. ISU STRATEGIS

Pembangunan Kabupaten Sleman saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Kapanewon Depok memiliki peran strategis dalam menjawab Isu Strategis sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman (RPJMD) periode 2021-2026 maupun periode 2025-2029.

Kapanewon Depok dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang (sesuai urusan, tisi dan kewenangan) dimaksud sebagaimana dijabarkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun secara periodik berisi rincian kinerja utama Pemerintah Daerah beserta target kinerja, program, dan anggaran Perjanjian Kinerja antara Panewu Depok dengan Bupati, serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan dengan Indikator Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja Kapanewon Depok.

Kinerja tahun 2025 merupakan tahap akhir periode pembangunan Pemerintah Kabupaten Sleman yang ditetapkan dalam Visi Kabupaten Sleman 2021-2026: *“Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong”*, Sekaligus menyongsong arah pembangunan dalam masa 5 (lima) tahun mendatang melalui Visi Kabupaten Sleman 2025-2029: *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”*.

Isu Strategis yang terkait dengan Urusan Pemerintah yang diampu dalam RPJMD periode 2021-2026, yakni:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan
3. Terciptanya ketentraman dan ketertiban di masyarakat
4. Terciptanya kerukunan di masyarakat

Peran strategis *Kapanewon Depok* dalam mengatasi isu strategis diwujudkan melalui dukungan kinerja terhadap Misi *“Mewujudkan reformasi birokrasi bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi tegaknya hukum, dengan rincian sebagai berikut:*

Tabel 1.4
Visi Misi Kapanewon Depok (Renstra 2025-2029)

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban				
Misi : Mewujudkan Rreformasi Birokrasi Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Menjunjung Tinggi Tegaknya Hukum				
Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah kapanewon	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kapanewon	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
			2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu 6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD
Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban				
Misi : Mewujudkan Rreformasi Birokrasi Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Menjunjung Tinggi Tegaknya Hukum				
Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
			4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional dan Lapangan 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

		4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
	2. Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kapanewon	3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD 4. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD 5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban				
Misi : Mewujudkan Rreformasi Birokrasi Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Menjunjung Tinggi Tegaknya Hukum				
Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Perubahan DPA SKPD 6. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			8. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD 3. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
		4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	9. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
		6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11. Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2. Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata

				3. Pemerintahan Desa Sub kegiatan Fasilitas i Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4. Sub Kegiatan Fasilitas i Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 5. Sub Kegiatan Fasilitas i Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 6. Sub Kegiatan Fasilitas i Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7. Sub Kegiatan Fasilitas i Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8. Sub Kegiatan Fasilitas i Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
--	--	--	--	--

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban				
Misi : Mewujudkan Rreformasi Birokrasi Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Menjunjung Tinggi Tegaknya Hukum				
Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		7. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
			13. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
		8. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	14. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		9. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	15. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	1. Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
		10. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	16. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1. Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan misi, Kapanewon Depok telah menyusun Renstra Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 yang berakhir pada 18 September 2025, dan Renstra Tahun 2025-2029. sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029.

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

A. PERIODE 2021-2026

Pada Renstra Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan utama, yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah, Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan yang baik, Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon, dan Meningkatkan Kerukunan Masyarakat.

Dari hasil telaah terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan, isu-isu strategis Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, serta tugas dan fungsi, rumusan pernyataan tujuan pada Renstra Tahun 2021-2026, yaitu:

Tabel 2.1

Pernyataan Tujuan pada Renstra Kapanewon Depok Tahun 2021-2026

VISI : "Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong"			
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Optimalisasi Pelaksanaan Program penunjang Pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan publik	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi melalui penguatan kelembagaan dan sarana prasarana penunjang. Mempermudah layanan masyarakat dengan penggunaan sistem teknologi informasi.
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kapanewon dan kalurahan yang baik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kapanewon dan kelurahan yang baik	Optimalisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Meningkatkan tata kelola kapanewon dan kelurahan melalui pembinaan dan pengawasan	Melakukan Pelatihan SDM Aparatur Kapanewon dan Kalurahan Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat
MISI 4 : Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum di kapanewon	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum di kapanewon	Optimalisasi pelaksanaan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Memperkuat sinergi dengan aparat kepolisian, TNI, Meningkatkan koordinasi dengan aparat kemanan desa/kelurahan
Meningkatnya kerukunan masyarakat	Meningkatnya kerukunan masyarakat	Optimalisasi pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan umum	Melakukan Pembinaan wawasan kebangsaan kepada aparaturnya dan masyarakat Melakukan Pembinaan Kerukunan antar umat beragama Koordinasi lintas instansi di tingkat Kapanewon

Tujuan dan Sasaran Kapanewon Depok sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Depok
(Tahun 2021-2026)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kapanewon Depok		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.75	82	82.5	83	83.5	84
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja di Kapanewon Depok	Predikat AKIP	A	A	A	A	A	A
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kapanewon dan kalurahan yang baik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kapanewon dan kalurahan yang baik	Jumlah kalurahan dengan predikat cepat berkembang	3	3	3	3	3	3
3	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum di Kapanewon Depok	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum di Kapanewon Depok	Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah Kapanewon Berbah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kerukunan masyarakat	Meningkatnya kerukunan masyarakat	Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. PERIODE 2025-2029

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan misi, Kapanewon Depok telah menyusun Renstra Tahun 2022-2029 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029. Pada Renstra Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029 telah ditetapkan tujuan utama, yaitu Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kapanewon. Dari hasil telaah terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan, isu-isu strategis Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, serta tugas dan fungsi; dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra Tahun 2025-2029, yaitu:

Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Depok 2025-2029

NO.	NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	TUJUAN	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	TARGET KINERJA TUJUAN TAHUN						Sumber Data
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan keuangan daerah	TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KAPANEWON		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten atas Laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Predikat AKIP terdiri dari: predikat AA nilai absolute= >85-100 interpretasi= memuaskan predikat A nilai absolute= >75-85 interpretasi= sangat baik predikat B nilai absolute= >65-75 interpretasi= baik predikat CC nilai absolute= >50-65 interpretasi= cukup baik predikat D nilai absolute= 0-30 interpretasi= kurang	Angka hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Perangkat Daerah	Nilai	84(A)	84(A)	84(A)	84(A)	84(A)	84(A)	Inspektorat
			Meningkatnya kualitas pelayanan Kapanewon	Survei Kepuasan Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan	Angka hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang	Nilai	86,25	86,35	86,45	86,55	86,75	87	Survei kepuasan masyarakat

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	TUJUAN	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Satuan	TARGET KINERJA TUJUAN TAHUN						Sumber Data
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.	dilakukan Perangkat Daerah								
			Meningkatnya kinerja pemerintah kapanewon	Nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Kapanewon	Nilai evaluasi kinerja pemerintah kapanewon adalah nilai yang diperoleh kapanewon, berdasarkan hasil penilaian capaian kinerja kapanewon	Nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Kapanewon	Nilai	94,70	94,75	94,80	94,85	94,90	95	Bagian Pemerintahan

Selaras dengan ketentuan dalam Peraturan MenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa salah satu kondisi untuk merevisi atau melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja yakni dalam hal terjadi perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan demikian, penyampaian pengukuran kinerja dalam LKjIP Tahun 2025 ini memuat hasil penghitungan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap Target Tahun 2025, dan target jangka menengah, serta Perjanjian Kinerja (perubahan terakhir atas perjanjian kinerja) yang memuat akhir periode RPJMD Tahun 2021-2026 maupun awal periode RPJMD 2025-2029.

Serangkaian tindak lanjut dalam target kinerja *nama perangkat daerah* tahun 2025 merupakan upaya mewujudkan asas akuntabilitas kinerja dalam mendukung implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Sleman, sebagai instansi yang “telah dianggap mampu memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil” (LHE AKIP KemenpanRB, 2024).

2.2 . INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. PERIODE 2021-2026

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Depok tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama Kapanewon Depok Tahun 2025 sebagai tahun akhir Renstra 2021-2025 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Target Indikator Kinerja Utama Kapanewon Depok Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Perubahan atas Target 2025
1.	Kepuasan masyarakat terhadap layanan Perangkat Daerah	Indeks	83.05	86,07
2.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat	A	A

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Perubahan atas Target 2025
3.	Jumlah Kalurahan dengan Predikat Cepat Berkembang	Jumlah Kalurahan	3	3
4.	Cakupan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang dilayani di Wilayah Kapanewon	Persen	100%	100%
5	Persentase Penanganan Permasalahan yang terkait isu SARA	Persen	100%	100%

*) nilai target setelah dilakukan penyesuaian

B. PERIODE 2025-2029

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Depok tercantum dalam dokumen Renstra sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama Kapanewon Depok Tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.6

Target Indikator Kinerja Utama Kapanewon Depok Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025 (Renstra 2025-2029)
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	84 (A)
2.	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	86.25
3.	Nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Kapanewon	Nilai	94.70

2.3. 2.3. PERJANJIAN KINERJA

A. PERIODE 2021-2026

Perjanjian Kinerja Kapanewon Depok Tahun 2025 periode 2021-2026 meliputi naskah Perjanjian Kinerja dan dalam perjalanannya terdapat naskah Perubahan yang disusun mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman, dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman

Tahun 2025 (termasuk perubahan atas dokumen tersebut), sebagaimana tergambar dalam tabel 2.7 di bawah ini:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Kapanewon Depok Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Tujuan/ Sasaran	satuan	Target 2025 (Renstra 2021-2026)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kapanewon Depok			1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86.07
		1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kapanewon Depok	2.	Predikat AKIP	Predikat	A
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan yang baik	2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan yang baik	3.	Jumlah Kalurahan dengan Predikat Cepat Berkembang	Kalurahan	3
3	Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon	3	Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon	4.	Cakupan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban yang Ditangani di Wilayah Kapanewon	%	100
4	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	4	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	5.	Persentase Penanganan Permasalahan yang Terkait Isu SARA	%	100

B. PERIODE 2025-2029

Perjanjian Kinerja Kapanewon Depok Tahun 2025 periode 2025-2029 merupakan bagian dari naskah Perubahan atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun menindaklanjuti pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025-2029, dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2025 (termasuk perubahan atas dokumen tersebut), sebagaimana tergambar dalam tabel 2.7 di bawah ini:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Kapanewon Depok Tahun 2025
(Renstra 2025-2029)

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target 2025 (Renstra 2025-2029)
1.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kapanewon			1.	Nilai AKIP Kapanewon	Predikat Nilai	84 (A)
		1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kapanewon	1.	Survei Kepuasan Masyarakat Kapanewon	Nilai	86,25
		2.	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kapanewon	2.	Nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Kapanewon	Nilai	94,70

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab III ini disajikan Capaian Kinerja dan Analisis Pengukuran Kinerja atas realisasi kinerja pada indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran. Analisis meliputi analisis pencapaian kinerja yang memuat analisis mengenai faktor penghambat, faktor pendukung dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja, prestasi yang diperoleh, dan analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Analisis pencapaian kinerja dalam LKJIP ini menyajikan hasil *benchmarking* antara realisasi capaian kinerja Kapanewon Depok tahun 2025 dengan capaian pada tahun sebelumnya, dengan capaian kinerja kabupaten/kota di wilayah Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dengan capaian kinerja Pemerintah Pusat/Nasional sepanjang data yang relevan tersedia. Penyajian data *benchmarking* dilakukan dengan harapan dapat memotret secara komprehensif capaian di tingkat internal, regional dan nasional.

Analisis Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya.

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran,

serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja Tujuan dan/atau Sasaran, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja Tujuan dan/atau Sasaran.

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja pada Kapanewon Depok bersifat positif yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Indikator yang ada pada Kapanewon Depok seluruhnya bersifat positif.

Berdasarkan perencanaan kinerja pada Bab II, terdapat 4 (empat) tujuan dan 1 (satu) sasaran yang didukung dengan 5 (lima) IKU dan indikator Perjanjian Kinerja. Pengukuran realisasi kinerja Kapanewon Depok dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja pada Periode 2021-2026 dan Periode 2025-2029 dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja pada Kapanewon Depok bersifat positif yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Indikator yang ada pada Kapanewon Depok seluruhnya bersifat positif. REALISASI KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Renstra 2021-2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditentukan dan ditetapkan dari tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021 -

2026/RKPD Tahun 2025/Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, terdapat 5 (lima) IKU ampunan Kapanewon Depok.

Daftar IKU periode 2021-2026 meliputi rincian IKU, satuan, definisi operasional dan rumus penghitungan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Daftar Indikator Kinerja Utama Kapanewon Depok (Renstra 2021-2026)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah angka indeks yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
2.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat AKIP	Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian PAN RB atas Laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja	Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB atau Inspektorat
3	Jumlah Kalurahan dengan Predikat Cepat Berkembang	Kalurahan	kalurahan dengan predikat cepat berkembang adalah Kelurahan yang mendapat hasil evaluasi sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah kalurahan dengan predikat cepat berkembang
4	Cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang dilayani di wilayah kapanewon	Persentase	Gangguan ketenteraman dan ketertiban adalah gangguan yang dilaporkan ke kapanewon. Penanganan gangguan meliputi: mediasi para pihak, patroli bersama aparat penegak hukum lainnya, dll	Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani dibagi jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban dikali 100 persen
5	Persentase Penanganan permasalahan yang terkait isu SARA	Persentase	Isu SARA adalah permasalahan yang terjadi di kapanewon yang berkaitan dengan keberadaan Ormas, Organisasi keagamaan, dll Penanganan permasalahan meliputi mediasi para pihak, dll	Permasalahan yang berkaitan dengan isu SARA yang ditangani dibagi permasalahan yang berkaitan dengan isu SARA dikalikan 100

Sedangkan rincian data IKU meliputi satuan, target dan perubahannya, realisasi tahun 2021-2025, persentase capaian kinerja 2025, target jangka menengah, dan persentase tingkat kemajuan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Rincian Data Indikator Kinerja Utama Kapanewon Depok Renstra 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi					Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah (Target Akhir RPJMD 2021-2025)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah
				2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	Indeks	83.50	82.87	84.24	85.6	86.07	89.17	103.60	86.25	120.36
2.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat	A	A	A	A	A	A	100	A	100
3	Jumlah Kalurahan dengan Predikat Cepat Berkembang	Jumlah Kalurahan	3	3	3	3	3	3	100	100	100
4	Cakupan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban yang Dilayani di Wilayah Kapanewon	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Penanganan permasalahan yang Terkait Isu SARA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100
RATA-RATA									100.72		104.07

*) Realisasi tahun 2024, sumber data LHE Inspektorat nomor 700/35/F/2025 tanggal 24 April 2025

Analisis capaian kinerja IKU berdasarkan data dalam Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa dari 5 (lima) IKU ampunan Kapanewon Depok, secara keseluruhan rata-rata Capaian Kinerja tahun 2025 dalam periode Renstra 2021-2026 sebesar 100.72%.

Analisis capaian kinerja berdasarkan data dalam Tabel 3.2. Rangkuman capaian kinerja IKU Kapanewon Depok hingga 5 (lima) tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, bila diperhitungkan secara rata-rata keseluruhan, telah mengalami tingkat kemajuan capaian indikator 104.07 bila dibandingkan dengan target jangka menengah.

B. Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditentukan dan ditetapkan dari tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029/RKPD Perubahan Tahun 2025/Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perubahan, terdapat 3 (tiga) IKU ampunan Kapanewon Depok.

Daftar IKU periode 2025-2029 meliputi rincian IKU, satuan, definisi operasional dan rumus penghitungan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Daftar Indikator Kinerja Utama Kapanewon Depok (Renstra 2025-2029)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten atas Laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Predikat AKIP terdiri dari: 1. predikat AA nilai absolute= >85-100 interpretasi= memuaskan 2. predikat A nilai absolute= >75-85 interpretasi= sangat baik 3. predikat B nilai absolute= >65-75 interpretasi= baik 4. predikat CC nilai absolute= >50-65 interpretasi= cukup baik 5. predikat D nilai absolute= 0-30 interpretasi= kurang	Hasil penilaian Inspektorat Kab Sleman
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kapanewon	Survei Kepuasan masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah	Angka hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Perangkat Daerah

			ditentukan.	
3	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kapanewon	Nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Kapanewon	Nilai evaluasi kinerja pemerintah kapanewon adalah nilai yang diperoleh kapanewon, berdasarkan hasil penilaian capaian kinerja kapanewon	Nilai evaluasi dari tim evaluasi kinerja (dari Bagian Pemerintahan)

Sedangkan rincian data IKU meliputi satuan, target dan perubahannya, realisasi tahun 2025-2029, persentase capaian kinerja, target jangka menengah, dan persentase tingkat kemajuan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Rincian Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Depok Tahun 2025
(Renstra 2025-2029)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja (%)	Target Jangka Menengah (Target Akhir RPJMD 2025-2029)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	84(A)	A	100	84(A)	100
2.	Survei Kepuasan masyarakat	Nilai	86.25	89.17	103.38	87	118.82
3	Nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Kapanewon	Nilai	94.70	90.57	95.63	95	100.67
Rata-rata					99.67		106.49

*) Realisasi tahun 2024, sumber data LHE Inspektorat nomor 700/35/F/2025 tanggal 24 April 2025

**) Realisasi /Baseline 2024, SK Bupati Nomor 41/Kep.KDH/A/2025 Hasil Evaluasi Kinerja Kapanewon Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024

Analisis capaian kinerja IKU berdasarkan data dalam Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) IKU ampuan Kapanewon Depok. Dari 3 (tiga) IKU tersebut 1 (satu) IKU telah dapat diukur hasilnya dengan rata-rata Capaian Kinerja tahun 2025 100%, sedangkan untuk 2 (dua) IKU lainnya capaiannya menggunakan periode Renstra 2025-2029 sebesar 100%.

Analisis capaian kinerja berdasarkan data dalam Tabel 3.4 Rangkuman capaian kinerja IKU Kapanewon Depok pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029, bila diperhitungkan secara rata-rata keseluruhan, telah mengalami tingkat kemajuan capaian indikator 106,49% bila

dibandingkan dengan target jangka menengah.

3.1.1 REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Dengan menyusun Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Kapanewon Depok Tahun 2025 beserta perubahannya disusun mengacu pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dan Tahun 2025-2029, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2025 dan perubahannya.

Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disajikan dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja tujuan dan sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan membandingkan antara target kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun 2025, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rekapitulasi Realisasi IKU dan Perjanjian Kinerja Kapanewon Depok
(Renstra 2021-2026)

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja
						Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kapanewon Depok	1		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86.07	89.17	103.60
		2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kapanewon Depok	Predikat AKIP	Predikat	A	A	A

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja
						Target	Realisasi	
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan yang baik	1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan yang baik	Jumlah Kalurahan dengan Predikat Cepat Berkembang	Jumlah Kalurahan	3	3	3
3	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon	1.	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon	Cakupan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban yang Ditangani di Wilayah Kapanewon	Persen	100	100	100
4	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	1.	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Persentase Penanganan Permasalahan yang Terkait Isu SARA	Persen	100	100	100

*) Realisasi tahun 2024, sumber data LHE Inspektorat nomor 700/35/F/2025 tanggal 24 April 2025

Tabel 3.2

Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja Kapanewon Depok Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

No.	Tujuan	No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025	
						Target	Realisasi
1.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kapanewon			Nilai AKIP Kapanewon	Nilai	A*	A
		1	Meningkatnya kualitas pelayanan kapanewon	Survei Kepuasan Masyarakat Kapanewon	Nilai	86.07	89.17
		2	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kapanewon	Evaluasi Kinerja Pemerintah Kapanewon	Nilai	94.70	90.57

*) Capaian 2024, LHE Inspektorat nomor 700/35/F/2025 tanggal 24 April 2025

**) Capaian 2024, SK Bupati Nomor 41/Kep.KDH/A/2025 Hasil Evaluasi Kinerja Kapanewon Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024

3.2 ANALISIS PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai capaian kinerja organisasi melalui pelaksanaan kegiatan dalam tujuan dan/atau sasaran, dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sleman. Pengukuran capaian kinerja organisasi dalam Laporan Kinerja tahun 2025 meliputi:

3.2.1 PENGHITUNGAN CAPAIAN KINERJA

Penghitungan persentase Capaian Kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut:

- a. untuk kinerja indikator yang menunjukkan “semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik”:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{RealisasiTahun2025}}{\text{TargetTahun2025}} \times 100\%$$

atau

- b. untuk kinerja indikator yang menunjukkan “semakin rendah realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik”:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{2 \times \text{TargetTahun2025} - \text{RealisasiTahun2025}}{\text{TargetTahun2025}} \times 100\%$$

3.2.2. PENGHITUNGAN TINGKAT KEMAJUAN:

Penghitungan tingkat kemajuan dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja IKU dan Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu periode Renstra 2021-2025 dan Renstra 2025-2029 dengan membandingkan antara target tahun 2025 dengan target jangka menengah, dengan penghitungan sebagai berikut:

- a. **Tingkat Kemajuan Renstra 2021-2026:**

$$\frac{\text{CapaianKinerjaTahun2025}}{\text{TargetJangkaMenengahRenstra2021-2026(TargetTahun2025)}} \times 100\%$$

- b. **Tingkat Kemajuan Renstra 2025-2029:**

$$\frac{\text{CapaianKinerjaTahun2025}}{\text{TargetJangkaMenengahRenstra2025-2029(TargetTahun2030)}} \times 100\%$$

Target jangka menengah dalam Renstra 2021-2026 adalah target tahun 2025.

Penggunaan target tahun 2025 sebagai target jangka menengah, dikarenakan periode RPJMD Tahun 2021-2026 telah berakhir pada 19 September 2025 dengan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029. Sedangkan untuk Renstra 2025-2029, menggunakan target tahun 2030 sebagai target jangka menengah. Penggunaan target tahun 2030 dimaksud merupakan transisi periodisasi menuju periode RPJMD selanjutnya, sehingga pengukuran tingkat kemajuan bersifat relevan dalam memantau kemajuan kinerja organisasi.

Analisis pengukuran kinerja memuat capaian kinerja IKU dan indikator Perjanjian Kinerja meliputi data realisasi, capaian kinerja dan tingkat kemajuan dari setiap Indikator Kinerja Utama tahun 2025 baik dalam periode Renstra 2021-2025 maupun Renstra 2025-2029.

A. RENSTRA 2021-2026

Tabel 3.7
Rekapitulasi Analisis Capaian Kinerja, dan Tingkat Kemajuan IKU, dan PK Kapanewon Depok Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)

No.	Indikator (IKU dan PK)	Satuan	Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	Target Jangka Menengah *)		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86.07	89.17	86.07	103.60	120.36
2.	Predikat AKIP	Predikat	A	A*	A**	100	100
3.	Jumlah Kalurahan dengan Predikat Cepat Berkembang	Jumlah Kalurahan	3	3	3	100	100
4.	Cakupan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban yang Ditangani di Wilayah Kapanewon	Persen	100	100	100	100	100
5.	Persentase Penanganan Permasalahan yang Terkait Isu SARA	Persen	100	100	100	100	100

*) Realisasi tahun 2024, sumber data LHE Inspektorat nomor 700/35/F/2025 tanggal 24 April 2025
 **) Target tahun 2025

B. RENSTRA 2025-2029

Tabel 3.8
Rekapitulasi Analisis Capaian Kinerja IKU, dan PK Kapanewon Depok
Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

No.	Indikator (IKU dan PK)	Satuan	Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%)
			Target	Realisasi	Target Jangka Menengah *)		
1.	Nilai AKIP Kapanewon	Predikat Nilai	84 (A)	84 (A)**	84 (A)	100	100
2.	Survei Kepuasan Masyarakat Kapanewon	Nilai	86.25	89.17	87	103.38	118.83
3.	Evaluasi Kinerja Pemerintah Kapanewon	Nilai	94.70	90.57***)	95	95.63	100.67

*) Target Tahun 2030

**) Realisasi tahun 2024, sumber data LHE Inspektorat nomor 700/35/F/2025 tanggal 24 April 2025

***)) Realisasi /Baseline 2024, SK Bupati Nomor 41/Kep.KDH/A/2025 Hasil Evaluasi Kinerja Kapanewon Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024

3.2.3 URAIAN RINGKAS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja *nama perangkat daerah* tahun 2025 dikompilasikan berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja terhadap setiap indikator dalam tujuan dan sasaran (IKU dan PK) sebagai berikut:

A. RENSTRA 2021-2026

TUJUAN I

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kapanewon Depok

3.2.3.1 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan di Kapanewon Depok. Realisasi indeks diperoleh dari hasil pengisian *survei* kepuasan masyarakat atas layanan Kapanewon Depok berupa pelaksanaan rapat dan pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kapanewon. Survei kepuasan masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu pada semester I dan semester II. Pengukuran indikataor SKM pada periode Renstra 2021-2025 menggunakan data

hasil SKM semester I dan II Kapanewon Depok.

Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon Depok tahun 2025 dengan target indikator 86,07 dan realisasi sebesar 89,17. Capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 103,38% dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 118.83%. Tabel 3.9

**Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
Berdasarkan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi			
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86.07	89.17	103.60	120.36	86.07

Tabel 3.10

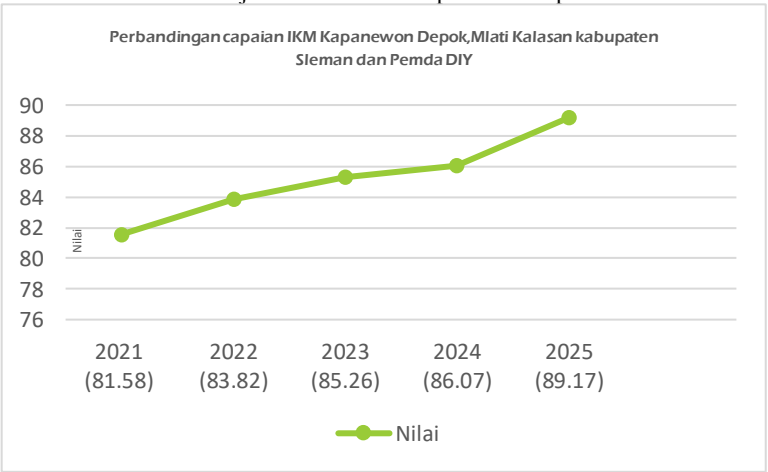
Rekapitulasi Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi					Target Akhir RPJMD 2021-2026	Perubahan Target 2025
		2021	2022	2023	2024	2025		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81.56	83.82	85.26	86.07	89.17	86.07	86.07

Berdasarkan tabel 3.2.3.1 Realisasi IKM kapanewon Depok 89.17 didapat dari hasil pengolahan data SKM yang menggunakan gabungan unsur pelayanan dan unsur rapat, setidaknya ada sembilan indikator yang diukur dalam SKM ini, hasil pengukuran masing-masing indikator ini tergambar dalam grafik 3.1 berikut:

Gambar 3.1

Realisasi Kinerja Indikator IKM Kapanewon Depok Tahun 2021- 2025



Tabel 3.7 Benchmarking Capaian IKM Kapanewon Depok, Mlati, Kalasan,

Perbandingan Capaian IKM Kapanewon Depok, Mlati, Kalasan, Kabupaten Sleman dan Pemda DIY Tahun 2025	
Instansi	Capaian
Kapanewon Depok	89.17
Kapanewon Mlati	85.02
Kapanewon Kalasan	85.79
Kabupaten Sleman	85,56
Pemda DIY	87,03

Sumber: Laporan SKM Tahun 2025

Periode 2021-2025, Capaian IKM Kapanewon Depok meningkat dari 86,07 menjadi 89,17. Hal ini menunjukkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan di Kapanewon Depok semakin baik. Pada tingkatan kapanewon di Kabupaten Sleman, IKM yang diperoleh cukup tinggi apabila dibandingkan capaian yang diperoleh Kapanewon Mlati dan Kalasan. Bila dibandingkan dengan capaian IKM Kabupaten Sleman dan Pemda DIY, capaian Kapanewon Depok telah berada di tingkat yang lebih tinggi.

Faktor Pendukung yang memengaruhi keberhasilan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon Depok sebagai berikut:

- a. Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh ASN Kapanewon Depok untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, hal ini merupakan wujud dari *tagline* Kapanewon Depok yaitu ***Nglayani lan Ngrampungni***;
- b. Implementasi Budaya Pemerintahan Khususnya “*Inovatif*” dalam pelayanan publik di Kapanewon Depok melalui inovasi sebagai berikut:
 - 1) Kado untuk Dilan (Kendaraan Antar Dokumen untuk Difabel dan lansia)
 - 2) Si Pakde(Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kapanewon Depok), melalui inovasi ini pengguna layanan administrasi kependudukan diberikan kemudahan untuk memperoleh akses layanan dari manapun;
 - 3) Kado untuk Dilan, melalui inovasi ini pengguna layanan yang

berkebutuhan khusus (disabilitas) dan penduduk lanjut usia diberikan prioritas khusus berupa pengantaran sampai ke alamat tempat tinggal atas layanan yang diminta.

4) Jebol Target

Faktor penghambat yang memengaruhi pencapaian mewujudkan Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon Depok. Berdasarkan laporan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 masih ditemui beberapa kelemahan yang menjadi permasalahan pencapaian IKM Kapanewon Depok sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan *security* terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik di Kapanewon Depok; dan
- b. Kurangnya monitoring terhadap pelaksanaan pelayanan publik, sebagai contohnya pemanfaatan kontak melalaui nomor *whatshaap* masih perlu ditingkatkan.

Adapun strategi dan langkah yang ditempuh Kapanewon Depok untuk terus meningkatkan kepercayaan masyarakat yaitu:

- a. Memberikan pelatihan internal kepada petugas pelayanan umum, termasuk melakukan sosialisasi SOP pelayanan publik guna mendukung peningkatan layanan;
- b. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana guna memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan;
- c. Mengoptimalkan sarana komunikasi *whatsapp* untuk memberitahukan kepada pengguna layanan progres layanan yang diminta.

SASARAN I

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kapanewon Depok

3.2.3.2 Indikator Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah,

dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Indikator Predikat AKIP diperoleh melalui hasil penilaian yang dilakukan oleh KementerianRB atau Inspektorat.

Predikat AKIP Kapanewon Depok tahun 2025 sampai dengan dengan penyusunan laporan ini belum diterbitkan oleh Inspektorat. Namun untuk periode tahun 2025 Kapanewon Depok menetapkan target indikator predikat AKIP memperoleh predikat A dan realisasi predikat A. Capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sebesar 100%, dan bila dibandingkan dengan Perubahan atas Target tahun 2025 sebesar 100%.

Tabel 3.12

Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator
Predikat AKIP berdasarkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Perubahan Target	Realisasi			
Predikat AKIP	Predikat	A	A	A*	100	100	100

*) Realisasi tahun 2024, sumber data LHE Inspektorat nomor 700/35/F/2025 tanggal 24 April 2025

Tabel 3.13

Rekapitulasi Realisasi Kinerja Indikator Predikat AKIP Tahun 2021-2025

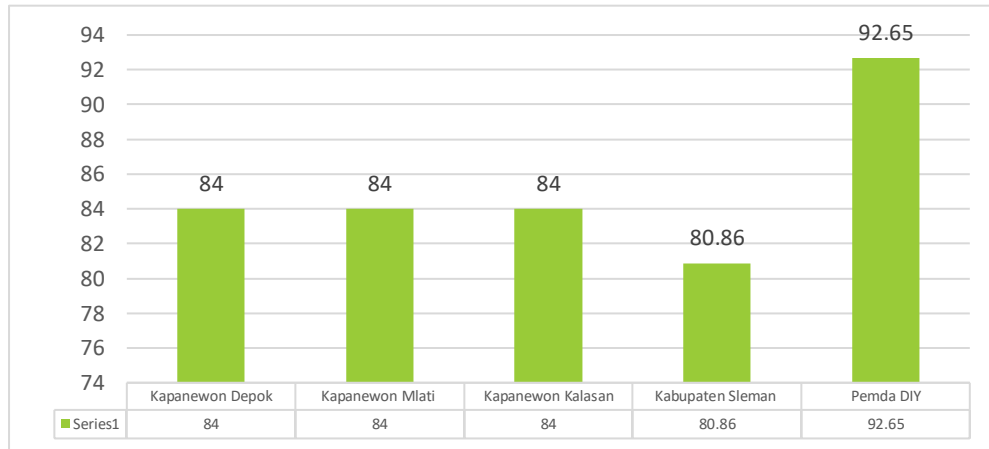
Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi					Target Akhir RPJMD 2021-2026	Perubahan Target 2025
		2021	2022	2023	2024	2025		
Predikat AKIP	Predikat	A	A	A	A	A	A	A

Realisasi tahun 2024, sumber data LHE Inspektorat nomor 700/35/F/2025 tanggal 24 April 2025

Berdasarkan Tabel 3.10 dapat terlihat bahwa capaian Predikat AKIP Kapanewon Depok konsisten memperoleh predikat A dari tahun 2021-2024. Konsistensi capaian ini menandakan bahwa Kapanewon Depok terus berusaha untuk menjaga akuntabilitas yang telah diraih pada periode sebelumnya. Hasil *benchmarking* dengan beberapa Instansi terkait capaian kinerja Indikator predikat AKIP sebagaimana ditampilkan dalam gambar 3.3 berikut:

Gambar 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Predikat AKIP Kapanewon Depok, Mlati, Kalasan, Kabupaten Sleman dan Pemda DIY



Tabel 3.3

Benchmarking Capaian Indikator AKIP Kapanewon Depok, Mlati, Kalasan, Kabupaten Sleman dan Pemda DIY Tahun 2025

Perbandingan Capaian Indikator AKIP Kapanewon Depok, Mlati, Kalasan, Kabupaten Sleman dan Pemda DIY Tahun 2024	
Instansi	Capaian
Kapanewon Depok	84,00
Kapanewon Mlati	84,00
Kapanewon Kalasan	84,00
Kabupaten Sleman	80,86
Propinsi DIY	92,65

Sumber: LHE Kapanewon Depok, Mlati, Kalasan, Kab. Sleman dan Pemda DIY

Periode 2021-2025, Capaian AKIP Kapanewon Depok konsisten memperoleh predikat A (memuaskan), ini berarti bahwa Kapanewon Depok dalam Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Capaian Kinerja telah berorientasi hasil.

Faktor Pendukung yang memengaruhi keberhasilan capaian predikat AKIP Kapanewon Depok sebagai berikut:

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan ASN Kapanewon Depok dalam penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang baik dan komprehensif sesuai dengan sistematika pedoman yang

diberikan;

- b. Sinergi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah direncanakan;
- c. Respon yang cepat dalam memberikan tindak lanjut pelaksanaan hasil evaluasi SAKIP pada tingkat perangkat daerah.

Gambar 3.3.

Kapanewon Depok Kembali Terpilih Sebagai Juara I
dalam Evaluasi Kinerja Kapanewon Tahun 2025



Faktor Penghambat yang memengaruhi pencapaian Indikator Predikat AKIP Kapanewon Depok

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kapanewon Depok Tahun 2025 walaupun predikat A telah tercapai namun kami melihat masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasi SAKIP di Kapanewon Depok diantaranya:

- a. Belum seluruh aparatur di Kapanewon Depok memahami SAKIP; dan
- b. Masih terdapat indikator kinerja dan target kinerja yang belum tepat pada kegiatan dan subkegiatan.

Langkah Strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Memperkuat evaluasi internal dalam bentuk rapat koordinasi;
- b. Meningkatkan kompetensi SAKIP untuk pelaksana teknis melalui kanal

yang disediakan oleh Pemkab Sleman ataupun KemenpanRB; dan

- c. Perlunya reviu indikator dan Capaian Indikator Kinerja secara teratur sehingga kinerja yang akan direncanakan dan hasil realisasinya lebih realistis.

Berikut adalah gambaran kegiatan Kapanewon Depok dalam mewujudkan Sasaran 1, “*Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*”

Gambar 3.4
Visualisasi Pelaksanaan Kegiatan dalam Pencapaian Kinerja Predikat AKIP
Kapanewon Depok Tahun 2025



Tujuan 2

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan yang Baik

3.2.2.2 Indikator Kalurahan dengan Predikat Cepat Berkembang

Kalurahan dengan Predikat Cepat Berkembang merupakan merupakan salah satu pengkatagorian lembaga kalurahan/desa berdasarkan Permendagri Nomor 81 tahun 2025 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Berdasarkan Permendagri tersebut bahwa Kalurahan Cepat Berkembang adalah kalurahan yang memperoleh nilai diatas atau sama dengan 451 (empat ratus lima puluh satu) dalam evaluasi penilaian yang dilaksanakan. Indikator jumlah kalurahan cepat berkembang diperoleh dari hasil penilaian yang diambil dari www.epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id.

Jumlah Kalurahan dengan Predikat Cepat Berkembang pada Kapanewon Depok tahun 2025 dengan target indikator 3 (tiga) kalurahan dan realisasi 3 (tiga) kalurahan. Capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100%, dan bila dibandingkan dengan perubahan atas target tahun 2026 sebesar 100%.

Tabel 3.12

Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Indeks Jumlah Kalurahan dengan Predikat Cepat Berkembang berdasarkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi			
Jumlah Kalurahan dengan Predikat Cepat Berkembang	Jml Kalurahan	3	3	100	100	3

Tabel 3.13

Rekapitulasi Realisasi Kinerja Indikator Indeks Jumlah Kalurahan dengan Predikat Cepat Berkembang Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi					Target Akhir RPJMD 2021-2026	Perubahan Target 2025
		2021	2022	2023	2024	2025		
Jumlah Kalurahan dengan Predikat Cepat Berkembang	Jml Kalurahan	3	3	3	3	3	3	3

Sumber data : <https://epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/>

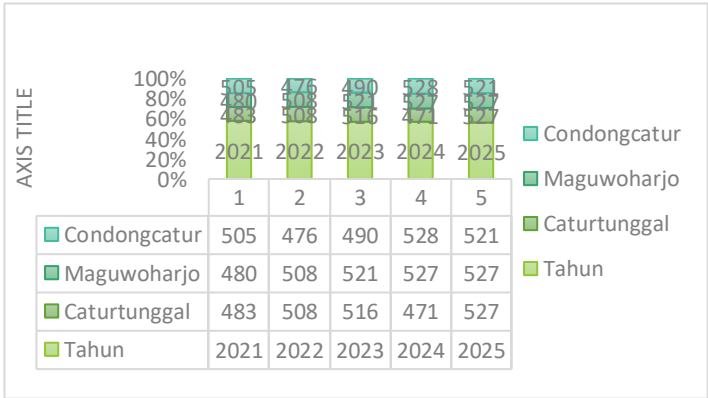
Berdasarkan Tabel 3.13 dapat terlihat bahwa jumlah kalurahan dengan predikat cepat berkembang pada Kapanewon Depok konsisten capaiannya. Konsistensi capaian ini menandakan bahwa Kapanewon Depok terus mendorong kalurahan untuk mempertahankan predikat yang telah diraih pada periode sebelumnya. Hasil *benchmarking* capaian kinerja Indikator jumlah kalurahan dengan predikat cepat berkembang sebagaimana ditampilkan dalam gambar 3.4 berikut:

Tabel 3.14
Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator
Jumlah Kalurahan Cepat Berkembang Tahun 2021-2025

Perbandingan Capaian Indikator Jumlah Kalurahan Cepat Berkembang pada Kapanewon Depok, Mlati, dan Kalasan Tahun 2025	
Instansi	Capaian
Kapanewon Depok	100%
Kapanewon Mlati	100%
Kapanewon Kalasan	100%

Pada Periode 2021-2025 Capaian Indikator Jumlah Kalurahan dengan predikat cepat berkembang telah tercapai 100%, hal ini berarti seluruh Kalurahan yang ada pada Kapanewon Depok masuk dalam kategori cepat berkembang. Apabila di *breakdown* penilaian masing-masing kalurahan maka hasil evaluasinya sebagai berikut:

Gambar 3.5 Grafik Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi Epdeskel pada Kalurahan di Kapanewon Depok



Faktor pendukung yang memengaruhi keberhasilan capaian jumlah kalurahan cepat berkembang pada Kapanewon Depok sebagai berikut:

- a. Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan ASN Kapanewon Depok dalam kegiatan kalurahan melalui memberikan pengawasan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan terhadap program dan kegiatan yang ada di Kapanewon Depok;
- b. Sinergi dan kerjasama yang baik antara kapanewon dan kalurahan dalam menjalankan tata pemerintahan kalurahan; dan
- c. Pendampingan yang dilakukan kapanewon sehingga optimal saat mengikuti penilaian *epdeskel*.

Faktor Penghambat yang memengaruhi pencapaian indikator jumlah kalurahan cepat berkembang.

Berdasarkan hasil evaluasi *epdeskel*, walaupun seluruh kalurahan di Kapanewon Depok telah masuk dalam kategori kalurahan cepat berkembang, masih ditemui beberapa kekurangan dan permasalahan diantaranya metode evaluasi memberikan titik jenuh bagi kalurahan sehingga konsistensi kalurahan dalam memenuhi bukti dukung evaluasi menjadi tidak stabil karena dalam evaluasi sebelumnya telah tercapai predikat cepat berkembang.

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengusulkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan untuk mencari metode yang memberikan tantangan yang lebih sesuai bagi kalurahan di wilayah Kapanewon Depok.

Gambar 3.6

Visualisasi Pelaksanaan Kegiatan dalam Pencapaian Kinerja Kalurahan dengan Predikat Cepat Berkembang Kapanewon Depok Tahun 2025





Tujuan 3

Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon

3.2.2.3 Indikator Cakupan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang ditangani di Wilayah Kapanewon

Gangguan ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum. Pengukuran indikator capaian kinerja cakupan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon diperoleh dari perhitungan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani dibagi jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban dikali 100 persen.

Cakupan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah Kapanewon Depok tahun 2025 dengan target indikator 100% ditangani dan realisasi 100%. Capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sebesar 100%, dan bila dibandingkan dengan Perubahan atas Target tahun 2025 sebesar 100%.

Tabel 3.16

Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Cakupan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Wilayah Kapanewon Tahun 2025 berdasarkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi			
Cakupan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban yang Ditangani di Wilayah Kapanewon	%	100	100	100	100	100

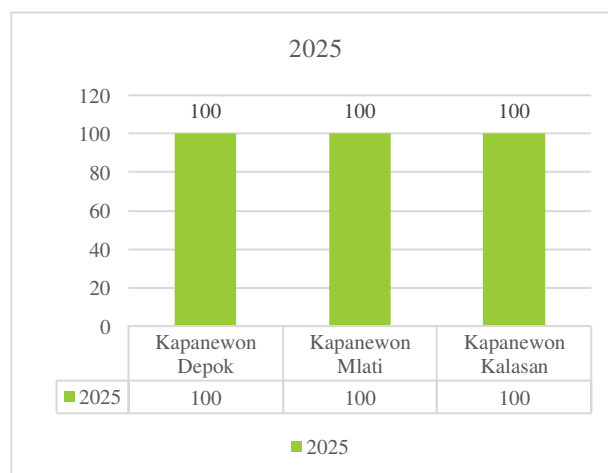
Tabel 3.17

Rekapitulasi Capaian Kinerja Cakupan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Wilayah Kapanewon Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Perubahan Target 2025
		2021	2022	2023	2024	2025		
Cakupan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani di Wilayah Kapanewon	%	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel 3.18 dapat terlihat bahwa capaian indikator cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah Kapanewon Depok konsisten di angka 100% hal ini yang menunjukkan adanya komitmen Kapanewon Depok untuk menjaga kondusifitas wilayah. Hasil *benchmarking* capaian kinerja Indikator cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon sebagaimana ditampilkan dalam diagram 3.5 berikut:

Gambar 3.5 Diagram Perbandingan Capaian Kinerja Cakupan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang ditangani di wilayah Kapanewon Depok, Mlati dan Kalasan



Tabel 3.19
Perbandingan Capaian Indikator Cakupan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
yang ditangani pada Kapanewon Depok, Mlati dan Kalasan Tahun 2021-2025

Perbandingan Capaian Indikator Cakupan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani pada Kapanewon Depok, Mlati dan Kalasan	
Instansi	Capaian
Kapanewon Depok	100%
Kapanewon Mlati	100%
Kapanewon Kalasan	100%

Berdasarkan data lapor Sleman tahun 2025, tercatat pada Kapanewon Depok terdapat 20 (dua puluh) aduan yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban. Gangguan keamanan dan ketertiban tersebut telah ditindaklanjuti dan diteruskan oleh *admin* lapor Sleman kepada pihak yang terkait. Bentuk tindak lanjut yang selama ini dilakukan oleh Kapanewon Depok terhadap setiap pengaduan yang masuk berupa:

- a. Pengkoordinasian masalah dengan pihak dan pemangku kepentingan yang terkait;
- b. Mediasi atas permasalahan dengan para pihak terkait;
- c. Supervisi lapangan pengaduan yang masuk; dan
- d. Edukasi kepada masyarakat.

Hasil rangkuman pengaduan masyarakat yang masuk ke Kapanewon Depok sebagai berikut: tindak lanjut pada Kapanewon Depok Tahun 2025

Tabel 3.20
Daftar aduan terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban
beserta tindak lanjut pada Kapanewon Depok Tahun 2025

No	Aduan	Bentuk Tindak Lanjut oleh Kapanewon Depok
1	Gangguan Kebisingan Akibat Pemutaran Musik Bersuara Sangat Keras Oleh Seorang Warga Yang Tinggal Di Sebelah Timur TPU Pasekan, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Aktivitas Tersebut Telah Berlangsung Bertahun-tahun Dan Sangat Mengganggu Kenyamanan Warga. Pengaduan Kepada Pihak RT Dan RW Sudah Berulang Kali Disampaikan,	Tim gabungan dari kapanewon dan kalurahan Maguwoharjo pada senin, 15 Desember 2025 Menyampaikan aduan ke 4 yang masuk kepada orang yg sama dalam satu tahun. Teguran keras sudah diberikan Tim agar terlapor jera membuat suara bising. Terlapor juga berjanji tikan akan cek sound lagi dgn volume kencang yang mengganggu. Tim gabungan Kapanewon Depok dan Kalurahan Maguwoharjo menindaklanjuti kembali aduan kakak dengan mengundang terlapor untuk

	Namun Belum Ada Penyelesaian Yang Efektif. Kami Memohon Pihak Berwenang Dapat Mengambil Tindakan Tegas Agar Ketertiban Dan Kenyamanan Lingkungan Kembali Terjaga. Orang Tua Yang Sakit Dan Anak Kecil Jadi Tidap Dapat Beristirahat. Mohon Untuk Diambil Tindakan Tegas.	membuat surat pernyataan sehingga berkekuatan hukum, dengan mengetahui antara Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dengan pak gimin, Sembego.
2.	Hal : permohonan jalan berlubang Dengan hormat,Sehubungan dengan kondisi jalan berlubang yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan penggunaannya, tepatnya di jl. Tambak asri no.1, dero, condongcatur, kec. Depok, kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta. Dengan ini kami izin meneruskan perihal laporan dari masyarakat yang melapor kepada kami terkait jalan berlubang yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan penggunaannya. Besar harapan kami bapak/ibu pihak terkait dapat menindaklanjuti permohonan tersebut. Berikut nomer tiket yang ada pada aplikasi jalan kita 2.0 :Sk00009945	Telah ditindaklanjuti oleh Tim Jawatan Kemakmuran Kapanewon Depok dan Pemerintah Kalurahan Condongcatur pada Jumat, 19 Desember 2025. Adapun detail tindak lanjut aduannya adalah Tim Tindak lanjut aduan telah bertemu dengan ketua Rw 61 ke lokasi yang dimaksud. Setelah dicek, jalan tersebut sebenarnya masuk dalam Pelaksanaan 2025 tapi blm terealisasi karena pendanaan belum cukup, sehingga untuk mencukupi dana perbaikan akan dianggarkan di tahun 2027 secepatnya. Perlu diketahui, bahwa lokasi adalah jalan lingkungan sehingga kewenangan pembangunan dan pemeliharaan adalah melalui Anggaran kalurahan, padukuhan dan swadaya masyarakat dan prosesnya harus melalui perencanaan. Terimakasih.
3.	Seringkali Terdengar Suara Musik Yang Sangat Kencang Dan Mengganggu. Bahkan Pada Hari Ini (Minggu, 16 Februari 2025), Sepanjang Sore S.d Malam Keras Sekali Dan Sangat Mengganggu (bahkan Saat Magrib). Musik Berasal Dari Atap Salah Satu Cafe/Resto Di Hotel Merapi Merbabu (Utara Altuz).	Aduan anda telah ditindaklanjuti oleh Jawatan Keamanan Kapanewon Depok. Hasil tindak lanjut aduan Hotel Merapi merbabu / plawangan bistro: - Jawatan Keamanan Kapanewon Depok pada hari kamis 20 februari 2025 telah bertemu dengan GM Hotel Merapi Merbabu dan Manager oprasional Plawangan bistro, tempat pertemuan di Hotel Merapi merbabu untuk menindak lanjuti aduan yang masuk dari lapor sleman, tim Kapanewon Depok mengkonfirmasi situasi saat terjadinya aduan yang dilaporkan
4.	saat belajar mengemudi beberapa waktu lalu di lapangan timur stadion Maguwoharjo, didatangi seseorang dan ditagih biaya 15 ribu rupiah dan mendapatkan bukti pembayaran sebagaimana pada lampiran. Pertanyaannya, apakah ini resmi dari Pemkab Sleman? Jika ilegal kami mohon untuk ditindak Terima kasih	Terkait aduan anda akan ditindaklanjuti oleh Jawatan Terkait. Terimakasih. Tindaklanjuti aduan 1: berdasarkan informasi, ini juga merupakan aduan berulang, seperti nya lapangan latihan mobil, dll, di stadion Maguwoharjo ada di wilayah Kapanewon Ngemplak. Terimakasih
5.	Proses pengurusan surat administrasi kependudukan di kelurahan Catur tunggal terhambat karena Lurah Caturtunggal adalah pjs dan sering ke kantor kecamatan. Akan lebih baik jika ada petugas yang	Terkait aduan anda telah kami teruskan ke PJ Lurah Caturtunggal, bahwa PJ Lurah memohon maaf atas hambatan dan ketidaknyamanannya karena di awal tahun 2025 Bulan Januari dan Februari ini memang kegiatan sedang banyak kegiatan di Kalurahan dan di Kapanewon Depok, sebenarnya terkait tanda

	menerima delegasi tanda tangan surat kependudukan yang sifatnya rutin.	tangan sudah memakai sistem "mengetahui atas nama PJ Lurah", hanya saja, untuk beberapa keperluan, yang mengharuskan ttd langsung PJ Lurah Caturtunggal, sehingga terdapat hambatan, namun PJ Lurah Caturtunggal sudah berusaha semaksimal mungkin di Kalurahan Caturtunggal. Jadi, sekali lagi PJ Lurah Caturtunggal memohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terimakasih
6.	saya jurnalis di Yogyakarta ada sedikit informasi yang meresahkan warga masyarakat dan anak2 kampus UNY dan UGM .Ada bangunan liar di Yona HIJAU Di depan Jl . Colombo NO 10 .bangunan tersebut PERMANEN dan Ada Toilet dan WC nya ,di situ ada pasangan kumpol KEBO yang Jualan Minuman Keras yang sangat merendahkan.mohon untuk di bongkar dan di tertibkan	Terkait aduan telah ditindaklanjuti oleh Jawatan Keamanan Kap. Depok, PJ Lurah Caturtunggal dan jajaran, Dukuh Samirono, Banbinsa Koramil 11 Depok, Bhabinkamtibmas Polsek Bulaksumur, dan Gabungan Fungsi Samapta, Serse, dan Intel Polsek Bulaksumur. Kegiatan tindak lanjut aduan dilakukan pada Jumat 7 Maret 2025, pukul 09.00 WIB. Adapun hasil tindak lanjut aduan adalah sebagai berikut:
7.	Kost2an TB 11 no 7 Babarsari, sahur2 pada mabuk,sampe ada yg teriak2 didepan rumah sy ,menyebabkan ibu sy yg sakit jantung sesak nafasnya, pemilik rumah TDK tinggal disitu,	Telah ditindaklanjuti oleh Jawatan Keamanan, dan ternyata berdasarkan koordinasi, Polsek Depok Barat telah mengamankan pemuda-pemuda yang mabuk dan meresahkan tersebut, tepat kemarin pagi tanggal 12 Maret 2025.
8.	Saya Warga Pogung, Pada Hari Ini Kamis Pukul 01.00 Dan 01.30 Dini Hari Mendengar Suara Bising Knalpot Brong Dari Banyak Motor, Saya Mengira Itu Dari Ringroad Utara, Mungkin Acara Rabu Gaul. Dari Suaranya Diduga Kuat Balapan. Setelag Beberapa Bulan Lalu Ada Kecelakaan Saat Balapan Liar, Mereka Vakum. Sepertinya Saat Ini Sudah Aktif Lagi. Mohon Ditertibkan.	terkait aduan anda, menurut Kapala Jawatan Keamanan Kap. Depok, kewenangan tindak lanjutnya harusnya ada di kepolisian apalagi balapan liar sempat menjadi kasus kepolisian karena sebelumnya menimbulkan korban jiwa dan terjadi di jalan nasional. Terimakasih
9.	Terima Kasih.	Terkait aduan anda telah ditindaklanjuti oleh Jawatan Kemanan Kapanewon Depok pada Rabu, 23 April 2025. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:
	Mohon maaf kak saya ingin membuat laporan terkait keketatan dalam menonton film di bioskop "CGV Jwalk jogja"	1. Pihak CGV sebenarnya telah mengingatkan bahwa film hanya untuk 21 tahun ke atas, namun beberapa ormag tua bersikeras
	Maaf kak sebelumnya ini kan saya barusan nonton film yang seharusnya berusia 21+	2. Ke depan, CGV akan lebih menegakkan soal batasan umur dan berlaku tegas
	Tapi waktu saya keluar dari ruangan saat film berakhir, ada beberapa anak dibawah 17 tahun dan 2 anak dibawah 10 tahun keluar dari studio yang sama dengan saya	Selamat pagi slemanis, terkait aduan anda, pohon yang terkena jaringan listrik sudah kita koordinasikan dengan PLN dan dari pihak PLN semoga bisa segera mengkondisikannya...terimakasih
10.	Mohon maaf apakah bisa diperketat lagi karena film dengan ketentuan 21+ itu kan harusnya penjagaan yang ketat, ini kok bisa lolos.	Terimakasih telah menunggu. Aduan anda telah ditindaklanjuti oleh Jawatan Kemakmuran dan Keamanan Kap. Depok, Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, BPKal Caturtunggal, Dukuh dan
	Pembangunan Ruang Usaha / Pabrik (walaupun Pemilik Usaha Mengaku	

	Hanya Umkm) Tapi Karyawan2 Yg Sekarang Saja Sudah Cukup Mengganggu, Sering Bleyer2 Motor. Truk2 Besar Juga Sering Datang Utk Mengangkut Produksi Mereka, Sangat Mengganggu Bikin Macet. Yang Jelas Ada Penolakan Dr Warga Papringan. Semoga Di Tindak Lanjuti Agar Pembangunan Pabrik Nya Ga Di Papringan. Makasih	DPMPTSP Sleman. Adapun hasil tindak lanjut adalah sebagai berikut: 1. Rencana Pembangunan di Jl.Petung 24 diterima oleh pimpinan CV Dwi Manunggal. 2. Dari hasil cek lokasi CV Dwi manunggal sudah melakukan perijinan NIB dan pengajuan KRK atas lahan tersebut, sudah dilakukan upload berkas ke sistem dan menunggu rekomendasi dari Dinas tata ruang, setelah itu proses PBG, dan terakhir baru konstruksi. 3. Tanggal 6 mei 2025 pukul 16.00, sudah dilakukan sosialisasi antara pelaku usaha, masyarakat sekitar, dan didampingi pemerintah kalurahan, serta Babinkamtibmas 4. Hasil dari sosialisasi tersebut adalah masyarakat setuju dengan adanya rencana pembangunan gudang tempat pacaking dengan tetap memenuhi persyaratan perijinan dan kesempatan dari warga. 5. Terkait tenaga kerja, CV Dwi Manunggal akan berkomitmen memastikan bahwa karyawan untuk menjaga tata tertib dan kenyamanan bagi warga sekitar.
11.	Tolong ditindaklanjuti masalah lubang itu dari jaman saya semester 1 sampat mau lulus belum ada tindakan, lokasi di pertigaan vokasi UGM Dokumentasi : foto ►Jalan di sebelah barat Gedung Vokasi UGM, tepatnya di depan warung mie ayam pojok Teknik. Waktu Laporan: Senin, 13 Mei 2025 Laporan: Banyak pengguna jalan mengeluhkan kondisi jalan yang berlubang besar di lokasi tersebut. Lubang tersebut telah menyebabkan banyak pengendara sepeda motor menjadi korban kecelakaan, terutama pada malam hari karena kurangnya penerangan dan rambu peringatan. Mohon agar kerusakan jalan ini dapat segera ditangani oleh pihak terkait demi keselamatan pengguna jalan lainnya. Laporan dan gambar disadur dari akun media X Merapi Uncover	Terkait aduan telah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan oleh Kepala Jawatan Kemakmuran Kap. Depok, bahwa aduan jalan tersebut sudah diteruskan ke Bina Marga Sleman sesuai kewenangan pemeliharaan jalan menunggu cek dari DPUP KP Sleman atas kewenangan jalan tersebut. Terimakasih
12.	Dengan Ini Ingin Melaporkan Bentuk Gangguan Kebisingan Akibat Pemutaran Musik Dengan Volume Sangat Tinggi Oleh Salah Satu Warga Yang Bertempat Tinggal Persis Di Sebelah Timur TPU Pasekan (Bedreg, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta).	Telah ditindaklanjuti oleh Jawatan Keamanan Kap. Depok dan pihak Kaluarahan. Adapun hasilnya adalah pihak teradu ke depan akan lebih memperhatikan dan tidak akan mengulangi lagi membuat suara-suara bising. Namun begitu, mari kita tetap awasi terus agar ke depan tidak terjadi lagi kebisingan tersebut. Terimakasih

13.	Mohon Bantuannya Sesegera Mungkin Utk Menertibkan ..di Tengah Pemukiman Warga Ada Tempat Pembakaran Dan Penumpukan Sampah Yang Sepertinya Mendapat Izin RT RW Setempat Karna Sebelumnya Udah Pernah Ada Warga Yg Melaporkan Tapi Sepertinya Ada Unsur Pembiaran...karna Udah Setahun Ini Tempat Tersebut Jadi Tempat Depo Sampah Nginap Dengan 2 Armada Truck Sampah Dan Beberapa Roda 3... Belakangan Ini Malahan Dibuat Jadi Tempat Pembakaran Sampah Secara Permanen...dimana Hal Tersebut Sangat Merugikan Bagi Kesehatan ...kenyamanan Dan Pencemaran Udara Yg Sangat Merugikan Bagi Kesehatan Dan Dampak Negatif Bagi Lingkungan...adapun Tempat Tersebut Berada Di Jalan Belah Ketupat RT 01... RW 02 ...pojok Pedukuhan Tiyasan Kelurahan Condong Catur Depok Sleman (google Map Tepat Di Belakang Treat And Talk)...dimohon Dengan Sangat Agar Instansi Berkaitan Dapat Melakukan Tindakan... Sebelum Dan Sesudah Nya Saya Ucapkan Matur Nuwun	Telah ditindaklanjuti oleh Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Keamanan Kapanewon Depok, Ulu-Ulu Kalurahan Condongcatur dan Dukuh Tiyasan pada 16 Juni 2025 pukul 13.30 - 15.00 WIB. Tim Tindak Lanjut Aduan bertemu dengan Bapak jono dan putranya selaku Pihak ke-3 pengambil sampah di lokasi. Dari hasil komunikasi bahwa: 1. Sampah yang dikelola pak jono mengambil sampah di padukuhan Manukan dan tiyasan menggunakan tosa sampah dipilah di lokasi yang organik setiap sore diambil petani ikan, yang laku jual (rongsok) dikumpulkan di lokasi dan residu dimasukkan ke Depo Sampah Dayu. 2. Bapak jono sudah mendapatkan ijin pembuangan residu ke Depo tersebut, dan pada saat tim tindak lanjut aduan mengecek lokasi memang ada kegiatan pemilahan sampah di lokasi. 3. Pada saat pengecekan oleh Tim, Tim tidak mendapati truk sampah di lokasi karena sedang melakukan pembuangan di piyungan. 4. Sampah dan truk di kelola Pak Ratno sekaligus pemilik lahan. Truk mengambil sampah di sekitar kuliner padukuhan tiyasan, tidak ada pemilahan dan langsung dikumpulkan di truk dan diangkut ke Piyungan.
14.	Calf Coffee setoran => https://maps.app.goo.gl/nuw2WUBYjBjxkFfe7 berada di dalam komplek perumahan. Apakah berijin? Klo malam sehabis jam operasional sering digunakan untuk ngobrol2 rame mengganggu warga perumahan. Walaupun tdk setiap hari tp sering. Beberapa kali sempet kami pergoki sedang digunakan untuk minum miras. Sudah diberi peringatan tidak digubris. Mohon diperhatikan ya Pak/Bu. Semoga ada solusi. Terima kasih.	Tindak lanjut aduan calf kopi to go: - menurut keterangan penanggung jawab di lokasi rumah di sewa untuk basecamp pegawai dari beberapa cabang usaha sejak 1 tahun lalu dan juga dijadikan tempat usaha cabang calf to go setoran - Lahan parkir usaha yang tidak memadai terutama untuk kendaraan bermotor roda dua, dan roda empat yang menumpang pada lahan parkir usaha lain di seberang. - Terkait perijinan penanggung jawab menginfokan bahwa masih di tanyakan kepada owner atau pemilik usaha. Dengan memberikan kontak kepada petugas kapanewon. NIB terlampir. - Usaha buka hingga pukul 20.00 - Di infokan bahwa ada kumpul team secara berkala sekitar 2 minggu sekali. - Diduga briefing yang dilakukan menimbulkan suara yang mengganggu warga di pemukiman perumahan. - Terkait aduan minuman keras saat berkumpul malam hari itu tidak benar.

15.	Suara Pabrik Es Kristal Di Denokan Maguwoharjo Depok Sleman Mengganggu Pendengaran/ Berdengung Mohon Di Stop	Hasil tindak lanjut aduan di pabrik Es Kristal Akasa: 1. Pabrik Es Kristal Akasa telah melakukan operasional pembuatan es kristal dan saat cek lokasi baru proses produksi dan pengepakan. Produksi dan pengepakan di lokasi inilah yang menyebabkan suara, dan memang saat kami di lokasi area Perumahan Puri Kahyangan memang terdengar suara produksi. 2. Namun begitu, saat kami Pihak Pabrik Es Kristal juga sedang mengerjakan pemasangan peredam di area produksi. 3. Tim selanjutnya melakukan koordinasi dengan penanggungjawab kegiatan diterima oleh bapak subhan dan ibu novuta (administrasi). Pihak manajemen memohon maaf atas ketidaknyamanan yg dialami oleh masyarakat. 4. Pabrik Es Kristas Akasa berkomitmen untuk menanggulangi masalah kebisingan yg ada dengan sedang mengerjakan proses pemasangan peredam di area lokasi produksi dan akan dicek kembali setelah selesai pemasangan, dan apabila masih terdengar dari lokasi lain akan dimaksimalkan pemasangan peredam lagi sampai suara tidak keluar dan tidak mengganggu kenyamanan warga.
16.	Mohon penertiban cafe Sunset Cafe di jl wahid hasyim nologaten. Cafe dibangun berdampingan dengan rumah warga, saat malam hari live musik sangat mengganggu anak tidur dan belajar. Apakah tanah kas desa boleh dijadikan cafe yang mengganggu istirahat warga sekitar? Mohon ditindak lanjuti njeh pak buk, maturnuwun	Hasil aduan adalah sebagai berikut: 1. Manajer Sunset Cafe memohonan maaf atas polusi suara yang terjadi akibat live musik yang bising 2. Manajer Sunset Cafe akan melakukan evaluasi terhadap pegawai agar kejadian tersebut tidak terulang kembali 3. Ke depan, Sunset Cafe berkomitmen akan membuat aturan yang tidak merugikan masyarakat, seperti volume pengeras suara dan mengatur kembali waktu pelaksanaan live musik
17.	5 Juli 2025 jam 2.17 wib msh terjadi polusi suara dr st bier ruko gatic jl perumnas seturan. Mohon mereka disuruh menutup jendela dg material yg lbh proper agar suara musik dr dalam tdk menyebar ke mana-mana, juga menutup pintunya. Ini wktnya orang beristirahat pak/bu. Bayangkan jd kami setiap hr harus terganggu suara bising musik, SETIAP HARI di waktu jam istirahat kami. Kami hanya menuntut hak kami itu saja, untuk bisa beristirahat dg tenang di waktu malam yg memang wktnya istirahat bukan wktnya org beraktifitas. Ini berhubungan dg kesehatan kami jg akhirnya. Dan di sekitar sini jg banyak orang2 yg sudah sepuh butuh istirahat yg	Selamat siang slemanis, aduan anda telah ditindaklanjuti oleh Kalurahan Caturtunggal, dan kapanewon Depok berniat menindaklanjuti aduan bersama Satpol PP Sleman

	proper. Mohon difasilitasi pak/bu. Mudah2an bisa menjadi ladang pahala bapak/ibu di pemkab Sleman.	
18.	Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dengan hormat, Dengan ini ingin melaporkan kembali bentuk gangguan kebisingan akibat pemutaran musik dan karaoke dengan volume sangat tinggi oleh warga yang bertempat tinggal persis di sebelah timur TPU Pasekan (Bedreg, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta). Selain itu, warga yang bertempat tinggal di tempat tersebut selalu mengadakan pesta miras (sering kali terlihat anak kecil), teriakan kasar, suara bising motor dari kejauhan hingga ke tempat warga tersebut, dan terkadang terdengar/membuat keributan. Kejadian ini tidak sekali dua kali terjadi, sudah beberapa kali diadukan dan sudah berulang kali disampaikan kepada pihak RT dan RW setempat, namun tidak di gubris, tidak ada titik terangnya, hasilnya nihil tidak ada perkembangan yang pasti. Keresahan dan kenyamanan warga lain sangat terganggu dengan permasalahan tersebut, terutama bagi pelajar/mahasiswa yang bertempat tinggal berdekatan yang membutuhkan kedamaian saat belajar, di mohon untuk dinas terkait untuk mengambil tindakan tegas ataupun sanksi tegas terhadap warga tersebut sesuai peraturan yang berlaku, serta adil bagi warga yang terganggu lainnya.	Terimakasih telah menunggu. Aduan anda telah ditindaklanjuti oleh Jawatan Keamanan Kap. Depok dan pihak Kaluarahan. Adapun hasilnya adalah pihak teradu ke depan akan lebih memperhatikan dan tidak akan mengulangi lagi membuat suara-suara bising. Namun begitu, mari kita tetap awasi terus agar ke depan tidak terjadi lagi kebisingan tersebut. Terimakasih
19.	Kios es teh bunda di pogung sebelum mm ugm ngambil badan jalan jadi bikin macet apalagi jam berangkat kerja/kuliah hadeh, mending kalau gak jualan bawa pulang aja kios nya jangan ditinggal dijalan	Selamat pagi Admin, mohon aduan diteruskan ke Satpol PP Keterangan dari Jawatan Keamanan Kapanewon Depok, bahwa sebenarnya aduan anda telah ditindaklanjuti lebih dari 2 kali, sepertinya pihak teradu belum ada itikad baik untuk berbenah, oleh karenanya tindaklanjut aduan akan diambil alih oleh Satpol PP. Adapun Kepala Jawatan keamanan telah berkoordinasi dengan Satpol PP agar menindaklanjuti. Terimakasih
20.	Selamat pagi dini hari.. Mau menanyakan hasil koordinasi keamanan kalurahan depok dengan satpol pp perihal polusi suara dr st bier di ruko gatic di jln perumnas.	Bahwa Kapanewon Depok melalui Jawatan Keamanan telah lebih dari dua kali ke pihak teradu, namun meski pada saat tindak lanjut penerimaannya baik, namun tindak lanjut dari pihak teradu untuk tidak menimbulkan kebisingan, masih terus

Bagaimana kelanjutannya pak/bu? Karena sampai saat ini, Sabtu 13 sept 2025, jam 02.59 wib masih terjadi polusi suara dr st bier ini. Kami akui ada sedikit penurunan volume suara dr st bier ini bbrp minggu belakangan, tp tetap saja suaranya masih ada, dan masih mengganggu. Apalagi setiap jam 2.30 - 3.30 SETIAP HARI, ada musik DJ yg suara bass nya sangat mengganggu istirahat kami. Kami hanya minta hak kami warga sekitar untuk beristirahat malam dengan baik, itu saja. Mohon pihak st bier disuruh menutup jendela dg material yg baik, bukan dg fiber yg biasa digunakan untuk pager. Dan membenahi akustik ruangnya agar suara dr dlm tdk bocor keluar.	dilanggar, kami sudah menginformasikan agar ditindak tegas oleh Satpol PP Kabupaten Sleman.
--	--

Faktor pendukung yang memengaruhi keberhasilan Indikator Cakupan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon sebagai berikut:

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan ASN Kapanewon Depok dalam merespon aduan masyarakat, hal ini diwujudkan dalam pembentukan tim unit reaksi cepat Kapanewon Depok;
- Sinergi dan kerjasama yang baik antara kapanewon dengan aparat kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Linmas Kalurahan dalam berbagai kegiatan di wilayah Kapanewon Depok;dan
- Komunikasi yang efektif antar pimpinan di wilayah Kapanewon Depok dalam mewujudkan kondisi yang kondusif.

Faktor Penghambat yang memengaruhi pencapaian cakupan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon diantaranya:

- Keterbatasan personil pada Jawatan Keamanan yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang tidak dapat mengimbangi luas wilayah, kompleksitas permasalahan yang ada di Kapanewon Depok;dan
- Laporan masyarakat sering tidak tepat pada subjek pengaduan sebagai contohnya terdapat permasalahan yang sebenarnya bisa selesai dan tertangani di tingkat RW dan Padukuhan dilaporkan ke Kapanewon.

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah

- Memperkuat sinergi dengan aparat keamanan di tingkat kalurahan;dan

- b. Memberikan edukasi kepada instansi di level yang lebih rendah dan warga masyarakat terkait dengan tugas dan kewenangan kapanewon khususnya terkait dengan keamanan dan ketertiban umum.

Gambar 3.

Visualisasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja indikator Cakupan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani di wilayah Kapanewon Depok Tahun 2025.



Tujuan 4

Meningkatnya Kerukunan Masyarakat

3.2.2.4 Persentase Penanganan Permasalahan yang terkait Isu SARA

Permasalahan Isu SARA merupakan permasalahan atau konflik sosial yang timbul di masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, dan ras antar golongan. Pengukuran indikator ini menggunakan rumus perhitungan *permasalahan yang berkaitan dengan isu SARA yang ditangani dibagi permasalahan yang berkaitan dengan isu SARA dikalikan 100*.

Tabel 3.2.1.1

Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator Persentase Penanganan Permasalahan yang Terkait Isu SARA berdasarkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi			
Persentase Penanganan Permasalahan yang Terkait Isu SARA	%	100	100	100	100	100

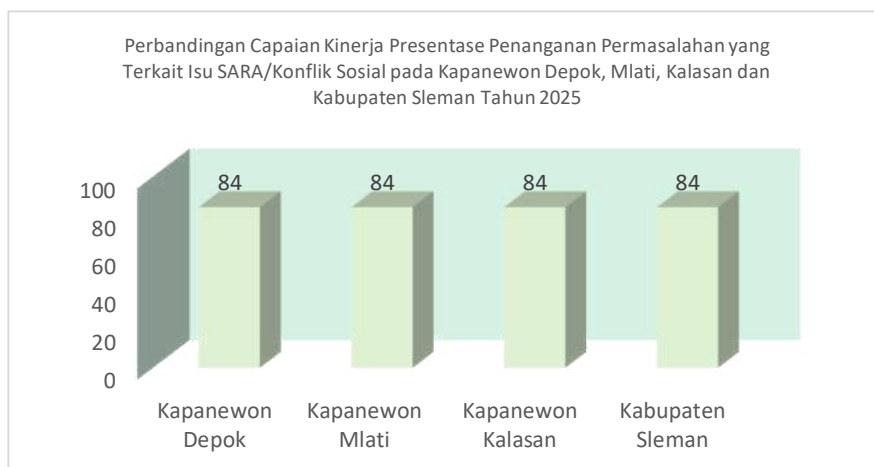
Tabel 3.23 Rekapitulasi Realisasi Kinerja Indikator Persentase Penanganan Permasalahan yang Terkait Isu SARA Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi					Target Akhir RPJMD 2021-2026	Perubahan Target 2025
		2021	2022	2023	2024	2025		
Persentase Penanganan Permasalahan yang Terkait Isu SARA	%	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel 3.23 terlihat bahwa capaian Indikator Persentase Penanganan Permasalahan yang Terkait Isu SARA di wilayah Kapanewon Depok konsisten tercapai 100%, hal ini menunjukkan adanya komitmen Kapanewon Depok untuk menjaga kondusifitas wilayah Kapanewon Depok dari permasalahan Isu SARA. Hasil *benchmarking* capaian kinerja indikator cakupan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon sebagaimana ditampilkan dalam gambar 3.7 berikut:

Gambar 3.7:

Perbandingan Capaian Kinerja Presentase Penanganan Permasalahan yang Terkait Isu SARA/Konflik Sosial pada Kapanewon Depok, Mlati, Kalasan dan Kabupaten Sleman Tahun 2025



Tabel 3.24
Perbandingan Capaian Indikator Persentase penanganan permasalahan
yang terkait isu SARA pada Kapanewon Depok, Mlati dan Kalasan
Tahun 2021-2025

Perbandingan Capaian Indikator penanganan permasalahan yang terkait dengan Isu SARA pada Kapanewon Depok, Mlati, Kalasan dan Kabupaten Sleman	
Instansi	Capaian
Kapanewon Depok	100%
Kapanewon Mlati	100%
Kapanewon Kalasan	100%
Kabupaten Sleman	100%

Faktor pendukung yang memengaruhi keberhasilan persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA di wilayah kapanewon sebagai berikut:

- a. Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan ASN Kapanewon Depok dalam merespon aduan masyarakat yang diwujudkan dalam pembentukan unit reaksi cepat Kapanewon Depok;
- b. Pendekatan Forkopim Kapanewon Depok kepada kelompok masyarakat minoritas yang ada di wilayah Kapanewon Depok; dan
- c. Sinergi dalam Tim Forum Keberagaman Umat Beragama (FKUB) dalam menciptakan situasi kondusif antar umat.

Pada indikator ini tidak terdapat faktor penghambat yang memengaruhi pencapaian indikator, meskipun demikian walaupun pada tahun 2025 tidak terjadi konflik sosial yang terkait dengan ISU SARA, Kapanewon Depok tetap mengupayakan terciptanya kondisi yang kondusif di wilayah Kapanewon Depok dengan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama melalui berbagai forum komunikasi di tingkat kapanewon.

B. PERIODE 2025-2029

TUJUAN I

Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kapanewon

3.2.3.1 Indikator Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Indikator Predikat AKIP diperoleh melalui hasil penilaian yang dilakukan oleh KementerianRB atau Inspektorat.

Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten atas Laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Predikat AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai Absolute	Interpretasi
1	AA	= >85-100	Memuaskan
2	A	= >75-85	Sangat baik
3	B	= >65-75	Baik
4	CC	= >50-65	Cukup baik
5	D	= 0-30	Kurang

Predikat AKIP Kapanewon Depok tahun 2025 sampai dengan dengan penyusunan laporan ini belum terbit. Namun untuk periode tahun 2025 Kapanewon Depok menetapkan target indikator predikat AKIP memperoleh predikat A dan realisasi predikat A. Capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100% dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sebesar 100%, dan bila dibandingkan dengan Perubahan atas Target tahun 2025 sebesar 100%.

Tabel 3.25 Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan
Indikator Predikat AKIP berdasarkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi			
Nilai AKIP Kapanewon	Nilai	A (84)	A (84)	100	100	A (84)

*) Realisasi tahun 2024, sumber data LHE Inspektorat nomor 700/35/F/2025 tanggal 24 April 2025

Tabel 3.26 Realisasi Kinerja Indikator Predikat AKIP Tahun 2025

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD 2021-2026
Nilai AKIP Kapanewon	Nilai	A* (84)	A (84)

*) Realisasi tahun 2024, sumber data LHE Inspektorat nomor 700/35/F/2025 tanggal 24 April 2025

Berdasarkan Tabel 3.26 dapat terlihat bahwa capaian Predikat AKIP Kapanewon Depok konsisten memperoleh predikat A dari tahun 2021-2025. Konsistensi capaian ini menandakan bahwa Kapanewon Depok terus berusaha untuk menjaga akuntabilitas yang telah diraih pada periode sebelumnya. Hasil *benchmarking* dengan beberapa Instansi terkait capaian kinerja Indikator predikat AKIP sebagaimana ditampilkan dalam gambar 3.3 berikut:

Tabel 3.27
Benchmarking Capaian Predikat AKIP Kapanewon Depok, Mlati, Kalasan, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Provinsi DIY Tahun 2025

Perbandingan Capaian IKM Kapanewon Depok, Mlati, Kalasan, Kabupaten Sleman dan Pemda DIY Tahun 2025	
Instansi	Capaian
Kapanewon Depok	84
Kapaneon Mlati	84
Kapanewwon Kalasan	84
Kabupaten Sleman	80,86
Pemerintah Daerah DIY	92,65

Sumber: LHE Kapanewon Depok, Mlati, Kalasan, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Provinsi DIY

Tahun 2025, capaian indikator nilai AKIP Kapanewon Depok masih menggunakan hasil nilai AKIP tahun 2024 memperoleh predikat A (memuaskan), ini berarti bahwa Kapanewon Depok dalam Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Capaian kinerja telah berorientasi hasil.

Faktor Pendukung yang memengaruhi keberhasilan capaian predikat AKIP

Kapanewon Depok sebagai berikut:

- a. Komitmen Pimpinan dan ASN Kapanewon Depok dalam menyusun proses perencanaan kinerja dengan melakukan pengukuran secara baik dan tepat waktu, menyusun laporan kinerja yang komprehensif sesuai dengan sistematika pedoman yang diberikan.
- b. Ketepatan/kecakapan SDM aparatur dalam memenuhi segala bentuk dokumen/laporan dalam implementasi SAKIP sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan;

Faktor penghambat yang memengaruhi pencapaian predikat AKIP Kapanewon Depok: Meskipun hasil dari LHE Kapanewon Depok tahun 2024 telah tercapai dengan predikat A, namun masih ada beberapa kekurangan dalam implementasi SAKIP di Kapanewon Depok antara lain :

- a. Belum seluruh aparatur di Kapanewon Depok memahami SAKIP.
- b. Perlunya reviu indikator dan capaian indikator kinerja secara teratur sehingga kinerja yang akan direncanakan dan hasil realisasinya lebih realistis.

Langkah Strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian indikator nilai AKIP Kapanewon Depok:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala dalam bentuk rapat koordinasi.
- b. Peningkatan kompetensi SAKIP untuk pelaksana teknis Berikut adalah gambaran kegiatan Kapanewon Depok dalam mewujudkan Sasaran 1, “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

Gambar 3.12
Visualisasi Pelaksanaan Kegiatan dalam Pencapaian Kinerja Nilai AKIP
Kapanewon Depok Tahun 2025





SASARAN I

Meningkatnya kualitas pelayanan kapanewon

3.2.2.2 Indikator Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan kapanewon. Survei Kepuasan Masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan. masyarakat pengguna layanan di Kapanewon Depok Realisasi indeks diperoleh dari hasil pengisian *survei* kepuasan masyarakat atas layanan Kapanewon Depok berupa pelaksanaan rapat dan pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kapanewon.

Survei Kepuasan Masyarakat Kapanewon Depok tahun 2025 dengan target indikator 86.25 dan realisasi sebesar 89,17. Capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 103,38% dengan tingkat kemajuan bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 118.83%, dan bila dibandingkan dengan perubahan atas target tahun 2025 sebesar 103.60%.

Tabel 3.28
Capaian Kinerja dan Tingkat Kemajuan Indikator
Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi			
Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,25	89,17	103.60	118.83	87

Sumber Data : Laporan IKM

Tabel 3.29

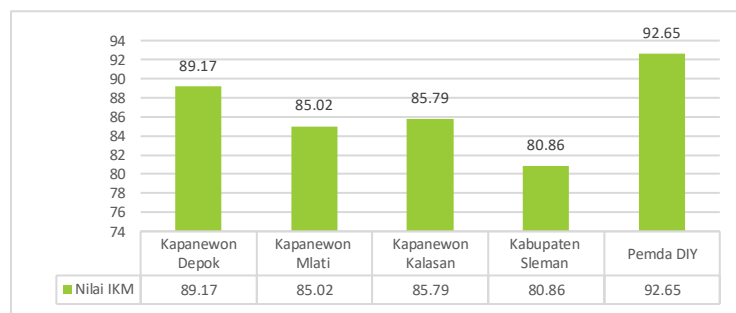
Rekapitulasi Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD 2025-2029
Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	89,17	87

Berdasarkan Tabel 3.29 dapat terlihat bahwa capaian Survei Kepuasan Masyarakat Kapanewon Depok melebihi target tahun 2025 dan target jangka menengah, yakni memperoleh nilai 89,17 Target 87. Hasil *benchmarking* capaian kinerja indikator Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana ditampilkan dalam grafik 3.15 berikut:

Gambar 3.13

Diagram Perbandingan Capaian Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat Kapanewon Depok, Mlati, Kalasan, Kabupaten Sleman dan Pemda DIY Tahun 2025



Tabel 3.30

Benchmarking Realisasi SKM Kapanewon Depok, Mlati, Kalasan, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Provinsi DIY Tahun 2025

Perbandingan Capaian IKM Kapanewon Depok, Mlati, Kalsan, Kabupaten Sleman dan Pemda DIY Tahun 2025	
Instansi	Capaian
Kapanewon Depok	89.17
Kapanewon Mlati	85.02
Kapanewon Kalasan	85.79
Kabupaten Sleman	80,86
Provinsi DIY	92,65

Sumber: LHE Kapanewon Depok, Mlati, Kalsan, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Provinsi DIY

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Kapanewon Depok melebihi target, artinya bahwa kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan di Kapanewon Depok semakin baik. Pada tingkat Kapanewon, SKM yang diperoleh cukup tinggi apabila dibandingkan capaian yang diperoleh Kapanewon Mlati dan Kalasan. Bila dibandingkan dengan capaian IKM Kabupaten Sleman dan Pemerintah Daerah DIY, capaian Kapanewon telah berada di tingkat yang lebih tinggi.

Faktor Pendukung yang memengaruhi keberhasilan capaian kinerja IKM Kapanewon Depok sebagai berikut:

- a. Ketersediaan fasilitas yang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan publik.
- b. Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Kapanewon Depok untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan terus mengembangkan metode pelayanan atas implementasi inovasi pelayanan publik antara lain :
 - Kado Manten
 - Kado untuk DILAN
 - JEBOL TARGET
- c. Ketersediaan informasi publik dan kemudahan dalam mengakses informasi terbaru.
- d. Kapasitas SDM yang baik dalam hal kemampuan memberikan pelayanan, alternatif solusi maupun pemahaman terkait aturan serta kemampuan bekerja sama dalam *teamwork*.
- e. Penerapan budaya SATRIYA yang mendukung peningkatan dalam pelayanan publik.

Faktor Penghambat yang memengaruhi pencapaian mewujudkan SKM. Berdasarkan Laporan SKM Tahun 2025 masih ditemui beberapa kelemahan yang menjadi permasalahan pencapaian SKM Kapanewon Depok, antara lain :

- a. Kurangnya pemahaman petugas pelayanan publik akan Standar Pelayanan yang berdasarkan SOP terbaru.

- b. Kurangnya SDM sehingga memperlambat waktu penyelesaian pelayanan.

Langkah Strategis Kapanewon Depok dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian indikator SKM:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas implementasi Inovasi Pelayanan dan terus mengembangkan mengikuti kebutuhan masyarakat di lingkungan Kapanewon Depok.
- b. Mempercepat proses penyampaian informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- c. Melakukan pemutakhiran atas Standard Operating Procedure (SOP) sesuai dengan kebijakan Standar Pelayanan terbaru.

Gambar 3.14
Visualisasi Pelaksanaan Kegiatan dalam Pencapaian Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat Kapanewon Depok 2025



SASARAN II

Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kapanewon

3.2.3.8 Indikator Evaluasi Kinerja Pemerintah Kapanewon

Nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Kapanewon adalah nilai yang diperoleh kapanewon berdasarkan hasil penilaian capaian kinerja kapanewon.

Nilai evaluasi kinerja kapanewon merupakan penjabaran pelaksanaan ketentuan pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa setiap tahun pemerintah daerah kabupaten melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan. Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, sebagai pedoman diterbitkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 34.3/Kep.KDH/A/2025

Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 8/Kep.KDH/A/2024 tentang Indikator Evaluasi Kinerja Kapanewon.

Pada tahun 2025 Kapanewon Depok menargetkan nilai sebesar 94.70 untuk indikator nilai evaluasi kinerja pemerintah kapanewon. Pada saat laporan ini disusun hasil evaluasi kapanewon masih belum tersedia, namun realisasi tahun 2024 yang penilaiannya dilaksanakan tahun 2025 Kapanewon Depok memperoleh nilai 90.57.

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Kapanewon Tahun 2025
berdasarkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Kemajuan (%) berdasarkan Target Jangka Menengah	Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi			
Evaluasi Kinerja Pemerintah Kapanewon	Nilai	94,70	90.57	95.63	100.67	95

**) Realisasi /Baseline 2024, SK Bupati Nomor 41/Kep.KDH/A/2025 Hasil Evaluasi Kinerja Kapanewon Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024

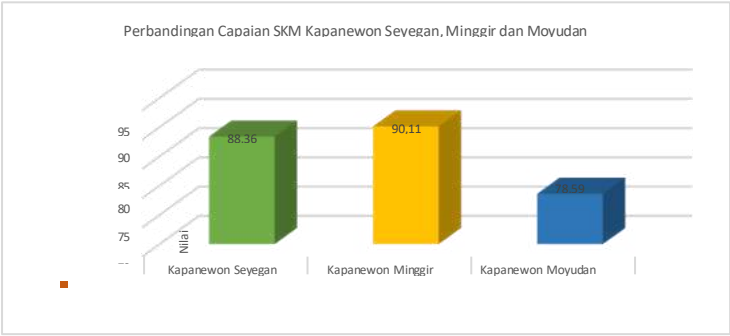
Tabel 3.32
Rekapitulasi Realisasi Kinerja Indikator Evaluasi Kinerja Pemerintah Kapanewon Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi 2025	Target Akhir RPJMD 2025-2029
Evaluasi Kinerja Pemerintah Kapanewon	Nilai	n/a	95

**) Realisasi /Baseline 2024, SK Bupati Nomor 41/Kep.KDH/A/2025 Hasil Evaluasi Kinerja Kapanewon Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024

Pada penilaian EKK Tahun 2024 yang dinilai pada tahun 2025, Kapanewon Depok memperoleh nilai 90.57 dan mendapatkan Juara 1 EKK pada kategori Perkotaan. Hasil *benchmarking* capaian kinerja indikator Evaluasi Kinerja Pemerintah Kapanewon sebagaimana ditampilkan dalam grafik 3.17 berikut:

Gambar 3.15
Diagram Perbandingan Capaian Kinerja Evalausi Kinerja Pemerintah Kapanewon Depok, Mlati dan Kalasan Tahun 2025



Tabel 3.33
Benchmarking Realisasi Nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Kapanewon Depok, Mlati dan Kalasan Tahun 2025

Perbandingan Capaian Evaluasi Kinerja Pemerintah Kapanewon Depok, Mlati dan Kalasan Tahun 2025	
Instansi	Capaian
Kapanewon Depok	90.57
Kapanewon Mlati	88.58
Kapanewon Kalasan	81.75

Sumber data : Realisasi /Baseline 2024, SK Bupati Nomor 41/Kep.KDH/A/2025 Hasil Evaluasi Kinerja Kapanewon Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2024

Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Kapanewon terhadap kinerja Kapanewon Depok melebihi target, artinya bahwa kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan di Kapanewon Depok semakin baik. Pada tingkat Kapanewon, Nilai Evaluasi Kinejra yang diperoleh cukup tinggi apabila dibandingkan capaian yang diperoleh Kapanewon Mlati dan Kapanewon Kalasan. Hal ini menjadi pemicu untuk meningkatkan nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Kapanewon.

Faktor Pendukung yang mempengaruhi keberhasilan capaiankinerja Evaluasi Kinerja Pemerintah Kapanewon Kapanewon Depok sebagai berikut:

- a. Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan ASN Kapanewon Depok dalam menangani permasalahan yang ada di masyarakat.
- b. Respon yang cepat dari aparat Kapanewon Depok dalam berkoordinasi terkait penyelesaian aduan masyarakat.
- c. Koordinasi dan sinergitas yang baik antar lintas sektoral di wilayah Kapanewon Depok baik kalurahan, Polsek, Koramil, UPTD, Dinas, Ormas, Relawan dan berbagai instansi terkait lainnya.
- d. Komunikasi efektif antar pimpinan di wilayah Kapanewon Depok dapat mewujudkan kondisi yang kondusif.

Faktor Penghambat yang memengaruhi pencapaian mewujudkan nilai evaluasi kinerja Pemerintah Kapanewon, antara lain :

- a. Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan khususnya terkait dengan kesadaran dalam menjalankan tanggungjawab dalam ketugasan.
- b. Kesadaran akan ketugasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang perlu ditingkatkan.

Langkah Strategis Kapanewon Depok dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian indikator EKK:

- a. Merespon aduan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah Kapanewon Depok secara cepat dan tepat,
- b. Menjalin kerja sama antara Kapanewon dengan instansi terkait.
- c. Mendorong kalurahan untuk mewujudkan seleksi SDM Pamong dan staf yang transparan dan akuntabel,
- d. Melakukan pendekatan dan pendampingan secara personal kepada pimpinan di lingkungan kalurahan agar melaksanakan tugas sesuai aturan,
- e. Melakukan sosialisasi dan pendampingan penerapan Reformasi Kalurahan,
- f. Melakukan pembinaan terhadap kinerja Lurah dan Pamong dan mendorong kalurahan untuk terus berinovasi.

3.3 ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN/ATAU SASARAN

A. PERIODE 2021-2026

Realisasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Program yang mendukung capaian Tujuan dan/atau Sasaran dalam IKU dan PK Periode Renstra Tahun 2021-2025 sebagai berikut:

Tabel 3.34 Rekapitulasi Persentase Realisasi
Anggaran IKU dan PK Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)				Keterangan
						Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kapanewon			Nilai AKIP Kapanewon		A(84)				
.		1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,93	4.167.422.487,00	4.013.728.048,00	96,31	Efisiensi
				Predikat AKIP	Program penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100	158.698.620,00	157.981.275,00	99,89	Efisiensi
.		2	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kapanewon	Nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Kapanewon	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,93	4.167.422.487,00	4.013.728.048,00	96,31	Efisiensi
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	100	260.448.640,00	251.640.810,00	96,62	Efisiensi
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	75.532.500,00	74.185.700,00	98,22	Efisiensi
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	233.432.355,00	231.556.072,00	99,20	Efisiensi
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	75.532.500,00	74.185.700,00	98,22	Efisiensi
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	153.101.370,00	149.220.351,00	97,47	Efisiensi
					Program penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100	56.008.950,00	55.997.857,00	99,98	Efisiensi

Analisis efisiensi anggaran setiap Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Tujuan Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kapanewon Depok/
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian Survey Kepuasan Masyarakat didukung oleh 2 (dua) program sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp4.013.728.048,00 dari anggaran sebesar Rp4.167.422.487,00 atau setara dengan 96.31% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 96.31% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut, yang bersumber dari:

- a. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik;
- b. Penghematan dibidang pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp157.981.275,00 dari anggaran sebesar Rp158.698.620,00 atau setara dengan 99.80% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 99.80% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut yang bersumber dari :

- a. Efisiensi gaji PHL yang telah diangkat menjadi PPPK
- b. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik;

2. Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan yang Baik / Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan yang Baik.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan sebesar Rp251.640.810,00 dari anggaran sebesar Rp260.448.640,00 atau setara dengan 96.62% dari total anggaran.

Realisasi keuangan sebesar 96.62% dibandingkan dengan persentase rata-rata

capaian kinerja tujuan/sasaran sebesar 100%. maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut, yang bersumber dari pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang mendukung Indikator sebesar Rp74.185.700,00 dari anggaran sebesar Rp75.532.500,00 atau setara dengan 98.22% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 98.22% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran sebesar 100%. Program ini terserap hampir seluruhnya sehingga tidak dilakukan efisiensi.

Kedua program tersebut mendukung Indikator Kinerja Jumlah Kalurahan dengan Predikat Cepat Berkembang.

3. Tujuan Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon / Sasaran Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mendukung Indikator Kinerja Cakupan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang ditangani di Wilayah Kapanewon sebesar Rp149.220.351,00 dari anggaran sebesar Rp153.101.370,00 atau setara dengan 97.47% dari total anggaran.

Realisasi keuangan sebesar 97,47% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran sebesar 100%. maka terdapat

efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut, yang bersumber dari :

- a. pengadaan barang dan jasa secara elektronik
 - b. ketidak hadirannya narasumber DPRD dalam kegiatan Forkompim.
4. Tujuan Terwujudnya Meningkatnya Kerukunan Masyarakat / Sasaran Meningkatnya Kerukunan Masyarakat

Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang mendukung Indikator Kinerja Persentase Penanganan Permasalahan yang Terkait isu SARA sebesar Rp231.556.072,00 dari anggaran sebesar Rp233.432.355,00 atau setara dengan 99,20% dari total

anggaran. Realisasi keuangan sebesar 99,20% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran sebesar 100%. maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut, yang bersumber dari pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

B. PERIODE 2025-2029

Realisasi anggaran yang digunakan dalam melaksanakan Program yang mendukung capaian Tujuan dan/atau Sasaran dalam IKU dan PK Periode Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.35
Rekapitulasi Persentase Realisasi Anggaran IKU dan PK Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

No	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)				Keterangan
						Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kapanewon			Nilai AKIP Kapanewon		A(84)				
.		1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,93	4.167.422.487,00	4.013.728.048,00	96,31	Efisiensi
				Predikat AKIP	Program penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100	158.698.620,00	157.981.275,00	99,89	Efisiensi
.		2	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kapanewon	Nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Kapanewon	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,93	4.167.422.487,00	4.013.728.048,00	96,31	Efisiensi
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	100	260.448.640,00	251.640.810,00	96,62	Efisiensi
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	75.532.500,00	74.185.700,00	98,22	Efisiensi
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	233.432.355,00	231.556.072,00	99,20	Efisiensi
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	75.532.500,00	74.185.700,00	98,22	Efisiensi
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	153.101.370,00	149.220.351,00	97,47	Efisiensi
					Program penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100	56.008.950,00	55.997.857,00	99,98	Efisiensi

Analisis efisiensi anggaran setiap program sebagai berikut:

Tujuan Terwujudnya akuntabilitas Kinerja pemerintah Kapanewon

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat didukung oleh 2 (dua) program sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik.

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kapanewon .

Capaian Kinerja Survei Kepuasan Masyarakat Kapanewon didukung oleh program:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan
- d. Program Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
- e. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1) Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung Indikator Survei Kepuasan Masyarakat Kapanewon sebesar Rp. 4.013.728.048,00 dari anggaran sebesar Rp. 4.167.422.487,00 atau setara dengan 96,31% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 96,31% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran sebesar 100,00%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut, yang bersumber dari:

- a. Sisa kegiatan sebagai akibat penggunaan sistem elektronik dalam pengadaan barang dan jasa.
- b. Penghematan di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;

2) Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp157.981.275,00 dari anggaran sebesar Rp158.698.620,00 atau setara dengan 99.89% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 99.89% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut yang bersumber dari :

- a. Efisiensi gaji PHL yang telah diangkat menjadi PPPK
 - b. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik;
- 3) Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan sebesar Rp251.640.810,00 dari anggaran sebesar Rp260.448.640,00 atau setara dengan 96,62% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 96,62% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran sebesar 100%. maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut, yang bersumber dari pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
- 4) Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp74.185.700,00 dari anggaran sebesar Rp75.532.500,00 atau setara dengan 98.22% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 98.22% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran sebesar 100%. Program ini terserap hampir keseluruhan sehingga tidak dilakukan efisiensi.
- 5) Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp149.220.351,00 dari anggaran sebesar Rp153.101.370,00 atau setara dengan 97.47% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 97.47% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran sebesar 100%. Maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut, yang bersumber dari:
- a. pengadaan barang dan jasa secara elektronik
 - b. ketidak hadiran narasumber DPRD dalam kegiatan Forkompim.

- 6) Realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp231.556.072,00 dari anggaran sebesar Rp233.432.355,00 atau setara dengan 99,20% dari total anggaran. Realisasi keuangan sebesar 99,20% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran sebesar 100%. maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut, yang bersumber dari pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

3.4. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat dari tercapainya 4 (empat) indikator kinerja tujuan dan 1 (satu) target indikator kinerja sasaran, yang didukung oleh tercapainya indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian seluruh sasaran strategis sebanyak 8 (delapan) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan. Sedangkan 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan merupakan tugas pembantuan dana keistimewaan DIY yang pelaksanaannya sesuai dengan berita Acara.

Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

A. PERIODE 2021-2026

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025

Tabel 3.36
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase pemenuhan layanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	100	100	100
	2. Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	100	100	100

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian Kinerja
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersedia tepat waktu	100	100	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan tersedia tepat waktu	100	100	100
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100	100	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan jasa penunjang	100	100	100
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	100

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran program sebesar Rp4.167.422.487,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp4.013.728.048,00 sehingga capaian kinerja keuangan 96,31%. Program ini mendapatkan dukungan dari 2 (dua) indikator kinerja program sebagai berikut:

1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%. Pengukuran indikator kinerja berdasarkan *jumlah layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah layanan yang seharusnya terpenuhi dikali 100*. Keberhasilan ini mendapat dukungan dari 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:
2. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan alokasi anggaran Rp49.064.350,00 dengan realisasi anggaran sebesar

Rp46.915.380,00 (95,62%). Kegiatan ini didukung oleh capaian 7 (tujuh) sub kegiatan yakni: Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 95,10%;

- (1) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 97,17%;
- (2) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 91,33%;
- (3) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 98,33%;
- (4) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 96,35%;
- (5) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,08%; dan
- (6) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,42%.

3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp3.273.226.807,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.155.033.162,00 (96,39%). Kegiatan ini didukung oleh capaian 3 (tiga) sub kegiatan yakni:

- (1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 96,42%;
- (2) Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 95,87%; dan
- (3) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 71,37%;

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp71.083.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp70.660.526,00

(99,40%). Kegiatan ini didukung oleh capaian 1 (satu) sub kegiatan yakni: Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,40%;

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp130.036.730,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp124.015.001,00 (95,37%). Kegiatan ini didukung oleh capaian 8 (delapan) sub kegiatan yakni:

- (1) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 73,91%;
- (2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 95,53%;
- (3) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 90,20%;
- (4) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 98,53%;
- (5) Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 95,18%;
- (6) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,84%;
- (7) Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 96,70%;

6. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja, dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%. Pengukuran indikator kinerja berdasarkan *jumlah layanan sarana dan prasarana yang terpenuhi dibagi jumlah layanan yang seharusnya terpenuhi dikali 100*. Keberhasilan ini mendapat dukungan dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp71.487.100,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp69.126.478,00 (97,90%). Kegiatan ini didukung oleh capaian 2 (dua) sub kegiatan yakni:

- (1) Subkegiatan Pengadaan Mebel dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 98,31%; dan
 - (2) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 95,10%.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp383.836.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp365.451.777,00 (95,21%). Kegiatan ini didukung oleh capaian 2 (dua) sub kegiatan yakni:
- (1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 95,74%; dan
 - (2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 95,00%.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp188.687.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp182.525.724,00 (96,73%). Kegiatan ini didukung oleh capaian 4 (empat) sub kegiatan yakni:
- (1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 94,21%;
 - (2) Subkegiatan Pemeliharaan Mebel dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 97,41%; dan
 - (3) Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,51%.
 - (4) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,80%

Keberhasilan pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memengaruhi capaian kinerja tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berhasil dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya target kinerja tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” sebesar 100,90%, dan tercapainya target kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” sebesar 100%. Pencapaian indikator kinerja tujuan/sasaran didukung pula oleh tercapainya 100% (seratus persen) target kinerja indikator program yakni:

- a. Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%; dan
- b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%.

Faktor Pendukung keberhasilan pencapaian kinerja program sebagai berikut:

- a. Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh ASN terhadap pelaksana program/kegiatan melalui proses penyusunan perencanaan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu;
- b. Dorongan pimpinan tertinggi Kapanewon Depok kepada pelaksana program/kegiatan di Kapanewon Depok untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan waktunya; dan
- c. Terdapatnya monitoring dan pengukuran secara berkala atas pelaksanaan program/kegiatan sehingga lebih mudah dilakukan.

Meskipun demikian, terdapat Faktor Penghambat dalam melaksanakan program/kegiatan dimaksud, yakni:

- a. Jadwal/agenda pelaksanaan proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang padat dan saling beririsan waktu pelaksanaannya dengan kegiatan dan/atau perintah pimpinan yang lain; dan
- b. Tidak lepas dari point a bahwa penggunaan sistem elektronik pada pemerintahan belum terintegrasi antar sistem dengan terpadu sehingga penggunaan sistem elektronik penunjang pemerintahan *tidak efektif* penggunaannya.

Solusi yang dilaksanakan dalam upaya mengatasi Faktor Penghambat sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu dan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan; dan
- b. Tetap menggunakan sistem yang ada sembari melakukan optimalisasi sumberdaya dalam pelaksanaan ketugasan.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 3.37
Realisasi Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian Kinerja
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1. Persentase usulan Kegiatan atau output Kegiatan yang tercantum dalam beritaacara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon	100	100	100
	2. Persentase pelayanan perijinan selesai tepat waktu	100	100	100
1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase usulan kegiatan atau output Kegiatan yang tercantum dalam beritaacara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon	100	100	100
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase layanan perizinan dan nonperizinan tepat waktu	100	100	100

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Alokasi anggaran program sebesar Rp158.698.620,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp157.981.275,00 sehingga capaian kinerja keuangan 99,55%. Program ini mendapatkan dukungan dari 2 (dua) indikator kinerja program sebagai berikut:

1. Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita acara hasil musrenbang kapanewon, dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%. Pengukuran indikator kinerja berdasarkan *jumlah*

usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita acara musrenbang kapanewon dibagi Jumlah usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara musrenbang kalurahan kali 100.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator ini adalah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan dengan alokasi anggaran Rp13.284.030,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp13.269.000,00 (99,89%). Kegiatan ini didukung oleh capaian 1 (satu) sub kegiatan yakni Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,89%

2. Persentase pelayanan perijinan selesai tepat waktu, dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%. Pengukuran indikator kinerja berdasarkan *jumlah pelayanan perijinan yang selesai tepat waktu dibagi jumlah pelayanan perijinan dikali 100*. Keberhasilan ini mendapat dukungan dari 1 (satu) kegiatan sebagai yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat dengan alokasi anggaran Rp145.414.590,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp144.712.275,00 (99,52%). Kegiatan ini didukung oleh capaian 1 (dua) sub kegiatan yakni Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan *Nonperizinan* capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,52%

Keberhasilan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik memengaruhi capaian kinerja tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik berhasil dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya target kinerja tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kapanewon Depok” sebesar 100%, dan tercapainya target kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” sebesar 100%. Pencapaian indikator kinerja tujuan/sasaran didukung pula oleh tercapainya 100% (seratus persen) target kinerja indikator program yakni:

- a. Presentase Persentase usulan Kegiatan atau output Kegiatan yang tercantum dalam berita acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%; dan
- b. Persentase Persentase pelayanan perijinan selesai tepat waktu dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%.

Pengukuran indikator kinerja berdasarkan jumlah sasaran pembangunan tahunan yang selaras dengan sasaran pembangunan lima tahunan dibagi jumlah sasaran pembangunan lima tahunan dikali 100.

Faktor Pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Program sebagai berikut:

- a. Komitmen pimpinan Kapanewon Depok untuk mengawal usulan kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat untuk dibawa dalam pelaksanaan musrenbang pada tingkat kapanewon; dan
- b. Komitmen Pimpinan dan ASN Kapanewon Depok untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan SOP yang terukur dan tepat waktu.

Faktor penghambat dalam melaksanakan program/kegiatan dimaksud, yakni:

- a. Bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan di Kapanewon Depok tidak dapat lepas dari instansi lain, hal ini masih terdapat banyaknya hambatan dari faktor eksternal kapanewon seperti gangguan server, gangguan akibat pemeliharaan jaringan dan ketidaktersediaan bahan dukungan pelayanan publik; dan
- b. Keengganan masyarakat untuk memberikan penilaian survei kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan.

Solusi yang dilaksanakan dalam upaya mengatasi Faktor Penghambat sebagai berikut:

Melalui media komunikasi yang ada, terhadap pengguna layanan publik diberikan informasi yang jelas terkait dengan gangguan sistem yang terjadi secara transparan.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan

Tabel 3.38
Tabel Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian Kinerja
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	45	45	100
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	100	100	100

Alokasi anggaran program sebesar Rp260.448.640,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp251.640.810,00 sehingga capaian kinerja keuangan 96,62%. Program ini mendapatkan dukungan dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi, dengan target 45% terealisasi 45% sehingga capaian kinerja 100%. Pengukuran indikator kinerja berdasarkan *jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi dibagi jumlah pemberdayaan masyarakat dikali 100*. Kegiatan ini didukung oleh capaian 2 (dua) sub kegiatan yakni:

- 1) Subkegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan dengan capaian fisik sebesar 100% dengan alokasi anggaran Rp147.451.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 138.777.550,00 (94,12%); dan
- 2) Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan capaian fisik sebesar 100% dengan alokasi anggaran Rp112.997.140,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 112.863.260,00 (99,88%).

Keberhasilan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik memengaruhi capaian kinerja tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan berhasil dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya target kinerja tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan yang Baik” sebesar 100%, dan

tercapainya target kinerja sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan yang Baik” sebesar 100%. Pencapaian indikator kinerja tujuan/sasaran didukung pula oleh tercapainya 100% (seratus persen) target kinerja indikator program yakni persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi dengan target 45% dan terealisasi 45% sehingga capaian kinerja 100%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja program sebagai berikut:

- a) Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh ASN terhadap pelaksana program/kegiatan yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kapanewon Depok; dan
- b) Atensi dan antusiasme yang cukup tinggi dari kelompok masyarakat di Kapanewon Depok sebagai penerima program/kegiatan untuk meningkatkan kompetensi khususnya di pengembangan usaha.

Meskipun demikian, terdapat Faktor Penghambat dalam melaksanakan program/kegiatan dimaksud, yakni:

- a) Tingginya frekuensi kegiatan pada kelompok masyarakat sehingga untuk mengadakan suatu kegiatan memerlukan perencanaan waktu yang baik; dan
- b) Keterbatasan alokasi anggaran pemberdayaan masyarakat pada Kapanewon Depok, yang mengakibatkan berkurangnya sasaran pelaksanaan program.

Solusi yang dilaksanakan dalam upaya mengatasi Faktor Penghambat yaitu dengan lebih mengoptimalkan sumber anggaran lain yang memungkinkan guna mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 3.39: Tabel Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian Kinerja
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Gangguan Ketentraman dan ketertiban yang di tangani di wilayah Kapanewon	100	100	100
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon	100	100	100
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penegakan perda	100	100	100

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Alokasi anggaran program sebesar Rp153.101.370,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp149.220.251,00 sehingga capaian kinerja keuangan 97,47%. Program ini mendapatkan dukungan dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu cakupan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon, dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%. Pengukuran indikator kinerja berdasarkan *jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani dibagi jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban dikali 100*. Keberhasilan ini mendapat dukungan dari 2 (dua) kegiatan sebagai yaitu

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran Rp145.601.370,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp141.726.851,00 (97,34%). Kegiatan ini didukung oleh capaian 1 (satu) Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 97,34%; dan
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan alokasi anggaran Rp7.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.493.500,00 (99,91%). Kegiatan ini didukung oleh capaian 1 (satu) Subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,91%.

Keberhasilan pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum memengaruhi capaian kinerja tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum berhasil dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya target kinerja tujuan “Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon” sebesar 100%, dan

tercapainya target kinerja sasaran “Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon sebesar 100%. Pencapaian indikator kinerja tujuan/sasaran didukung pula oleh tercapainya 100% (seratus persen) target kinerja indikator program yakni Cakupan Gangguan Ketentraman dan ketertiban yang di tangani di wilayah Kapanewon dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%.

Faktor Pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Program sebagai berikut:

- a) Komitmen Pimpinan dan ASN Kapanewon Depok untuk terus memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat khususnya dalam menindaklanjuti aduan masyarakat melalui Unit Reaksi Cepat Kapanewon Depok, dimana aduan yang masuk harus ditangani dalam kurun waktu 1 x 24 jam; dan
- b) Sinergi yang baik dengan instansi terkait khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam menciptakan kondisi yang kondusif di bidang keamanan dan ketertiban.

Meskipun demikian, terdapat Faktor Penghambat dalam melaksanakan program/kegiatan dimaksud yaitu keterbatasan personil pada Jawatan Keamanan yang hanya berjumlah 3 (tiga) personil tidak dapat mengimbangi luas wilayah, kompleksitas permasalahan yang ada pada Kapanewon Depok. Solusi yang dilaksanakan dalam upaya mengatasi Faktor Penghambat dengan memperkuat sinergi dengan aparatur Kepolisian, TNI dan Linmas Kalurahan dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah Kapanewon Depok.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Tabel 3.40Tabel Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian Kinerja
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA	100	100	100
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA	100	100	100

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Alokasi anggaran program sebesar Rp233.432.355,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp231.556.072,00 sehingga capaian kinerja keuangan 99,20%. Program ini mendapatkan dukungan dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%. Pengukuran indikator kinerja berdasarkan *permasalahan yang berkaitan dengan isu SARA yang ditangani dibagi permasalahan yang berkaitan dengan isu SARA*. Keberhasilan ini mendapat dukungan dari 1 (satu) kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan alokasi anggaran Rp233.432.355,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp231.556.072,00 (99,20%). Kegiatan ini didukung oleh capaian 2 (dua) subkegiatan yakni:

- a. Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan capaian fisik sebesar 100% dengan alokasi anggaran Rp130.131.355,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp129.040.072,00 (99,16%);
- b. Subkegiatan Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan capaian fisik sebesar 100% dengan alokasi anggaran Rp103.301.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp102.516.000,00 (99,24%).

Keberhasilan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memengaruhi capaian kinerja tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum berhasil dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya target kinerja tujuan “Meningkatnya Kerukunan Masyarakat” sebesar 100%, dan tercapainya target kinerja sasaran “Meningkatnya Kerukunan Masyarakat” sebesar 100%. Pencapaian indikator kinerja tujuan/sasaran didukung pula oleh tercapainya 100% (seratus persen) target kinerja indikator program yakni Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA dengan

target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%.

Faktor Pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Program sebagai berikut:

- a) Pendekatan secara intensif pimpinan Kapanewon Depok kepada tokoh masyarakat terkait pentingnya menjaga kerukunan antar di masyarakat; dan
- b) Peran Forkopim Kapanewon Depok dalam dalam pengkondisian wilayah terkait dengan kegiatan preventif pencegahan potensi konflik sosial.

Pada pelaksanaan program ini tidak terdapat faktor penghambat yang memengaruhi pencapaian program, walaupun pada tahun 2025 tidak terjadi konflik sosial yang terkait dengan ISU SARA, Kapanewon Depok tetap mengupayakan terciptanya kondisi yang kondusif di wilayah Kapanewon Depok dengan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama melalui berbagai forum komunikasi di tingkat kapanewon.

f. Program Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Tabel 3.41
Tabel Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian Kinerja
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kalurahan menetapkan Peraturan kalurahan tepat waktu	100	100	100
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase menetapkan Peraturan Kalurahan Tepat Waktu	100	100	100
	Persentase Kalurahan yang Melaksanakan Siklus Tahunan Tepat Waktu	85	85	100

Program Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan Alokasi anggaran program sebesar Rp. 75.532.500,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp74.185.700,00 sehingga capaian kinerja keuangan 98,22%. Program ini mendapatkan dukungan dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu SARA dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%. Pengukuran indikator kinerja

berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan isu SARA yang ditangani dibagi permasalahan yang berkaitan dengan isu SARA. Keberhasilan ini mendapat dukungan dari 1 (satu) kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan alokasi anggaran Rp233.432.355,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp231.556.072,00 (99,20%). Kegiatan ini didukung oleh capaian 2 (dua) subkegiatan yakni:

- 1) Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan capaian fisik sebesar 100% dengan alokasi anggaran Rp4.225.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp4.211.100,00 (99,67%).
- 2) Subkegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan capaian fisik sebesar 100% dengan alokasi anggaran Rp16.057.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp15.966.500,00 (99,43%).
- 3) Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan capaian fisik sebesar 100% dengan alokasi anggaran Rp7.100.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp6.863.000,00 (96,66%).
- 4) Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan capaian fisik sebesar 100% dengan alokasi anggaran Rp6.850.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp6.832.800,00 (99,75%).
- 5) Subkegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa dengan capaian fisik sebesar 100% dengan alokasi anggaran Rp22.050.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp22.026.200,00 (99,89%).
- 6) Subkegiatan Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan capaian fisik sebesar 100% dengan alokasi anggaran Rp13.200.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp12.237.000,00 (92,70%).
- 7) Subkegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan Dan Penegasan Batas Desa dengan capaian fisik sebesar 100% dengan alokasi anggaran Rp6.050.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp6.049.100,00 (99,99%).

- g. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota berhasil dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya target kinerja tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah” sebesar 100,72% dan tercapainya target kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” sebesar 100%. Pencapaian indikator kinerja tujuan/sasaran didukung pula oleh tercapainya 2 (dua) target kinerja indikator program yakni:
- a) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%
 - b) Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%

Faktor Pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Program sebagai berikut :

- a. Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh ASN Kapanewon Depok untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan terus mengembangkan metode pelayanan atas implementasi inovasi pelayanan publik serta menyusun proses perencanaan kinerja dengan melakukan pengukuran secara baik dan tepat waktu, menyusun laporan kinerja yang komprehensif sesuai dengan sistematika pedoman yang diberikan.
- b. Ketersediaan fasilitas yang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan publik.
- c. Ketersediaan informasi publik dan kemudahan dalam mengakses informasi terbaru
 - a) Kapasitas SDM yang baik dalam hal kemampuan memberikan pelayanan, alternatif solusi maupun pemahaman terkait aturan serta kemampuan bekerja sama dalam teamwork.
 - b) Penerapan budaya SATRIYA yang mendukung peningkatan dalam pelayanan publik.
 - c) Ketepatan/kecakapan SDM aparatur dalam memenuhi segala bentuk dokumen/laporan dalam implementasi SAKIP sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan;

Meskipun demikian, terdapat Faktor Penghambat dalam melaksanakan program/kegiatan dimaksud, yakni :

- a) Kurangnya pemahaman petugas pelayanan publik akan Standar Pelayanan yang berdasarkan SOP terbaru.
- b) Kurangnya SDM sehingga memperlambat waktu penyelesaian pelayanan.
- c) Belum seluruh aparat di Kapanewon Seyegan memahami SAKIP
- d) Perlunya revaluasi indikator dan capaian indikator kinerja secara teratur sehingga kinerja yang akan direncanakan dan hasil realisasinya lebih realistis.

Solusi yang dilaksanakan dalam upaya mengatasi Faktor Penghambat sebagai berikut:

- a) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas implementasi Inovasi Pelayanan dan terus mengembangkan mengikuti kebutuhan masyarakat di lingkungan Kapanewon Depok.
- b) Mempercepat proses penyampaian informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- c) Melakukan pemutakhiran atas *Standard Operating Procedure* (SOP) sesuai dengan kebijakan Standar Pelayanan terbaru.
- d) Peningkatan kompetensi SAKIP untuk pelaksana teknis

h. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik berhasil dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya target kinerja tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kapanewon Depok” sebesar 100% dan tercapainya target kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” sebesar 100%. Pencapaian indikator kinerja tujuan/sasaran didukung pula oleh tercapainya 100% (seratus persen) target kinerja indikator program yakni:

- a) Persentase usulan kegiatan atau output kegiatan yang tercantum dalam berita acara Musrenbang Kalurahan yang disepakati untuk masuk dalam Berita Acara hasil Musrenbang Kapanewon dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%.
- b) Persentase Pelayanan Perizinan Selesai Tepat Waktu dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Program sebagai berikut:

- a) Komitmen pimpinan dan ASN untuk mengawal usulan kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat untuk dibawa dalam pelaksanaan musrenbang pada tingkat kapanewon
- b) Komitmen pimpinan beserta ASN untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang didukung dengan SOP yang terukur dan tepat waktu.

Meskipun demikian, terdapat faktor penghambat dalam melaksanakan program/kegiatan dimaksud, yakni:

- a) Kurangnya pemahaman masyarakat akan adanya standar pelayanan berdasarkan SOP
- b) Kurangnya SDM dalam memberikan pelayanan

Solusi yang dilaksanakan dalam upaya mengatasi Faktor Penghambat sebagai berikut:

- a) Meningkatkan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas.

- b) Penyampaian informasi terkait standar pelayanan melalui media elektronik
- i. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan berhasil dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya target kinerja tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan yang Baik” sebesar 100%, dan tercapainya target kinerja sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan yang Baik” sebesar 100%. Pencapaian indikator kinerja tujuan/sasaran didukung pula oleh tercapainya 100% (seratus persen) target kinerja indikator program yakni Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi dengan target 45% terealisasi 45% sehingga capaian kinerja 100%.

Faktor Pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Program sebagai berikut:

- a) Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh ASN terhadap pelaksana program/kegiatan yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kapanewon Depok.
- b) Respon dan antusiasme yang baik dan cukup tinggi masyarakat Kapanewon Depok sebagai penerima program/kegiatan dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Meskipun demikian, terdapat faktor penghambat dalam melaksanakan program/kegiatan dimaksud, yakni:

- a) Tingginya intensitas kegiatan pada berbagai tingkatan masyarakat perlu mendapat memerlukan perencanaan waktu yang lebih dini
- b) Keterbatasan alokasi anggaran pemberdayaan masyarakat pada Kapanewon Depok

Solusi yang dilaksanakan dalam upaya mengatasi faktor penghambat adalah

- a) Melakukan penjadwalan proses perencanaan dengan lebih cermat sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik
- b) mengoptimalkan sumber anggaran lain yang memungkinkan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- j. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya target kinerja tujuan “Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon” sebesar 100%, dan tercapainya target kinerja sasaran “Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon sebesar 100%. Pencapaian indikator kinerja tujuan/sasaran didukung pula oleh tercapainya 100% (seratus persen) target kinerja indikator program yakni Cakupan Gangguan Ketentraman dan ketertiban yang di tangani di wilayah Kapanewon dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Program sebagai berikut:

- a) Komitmen Pimpinan dan ASN Kapanewon Depok untuk terus memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat dengan menyaring informasi, aduan yang akan ditindaklanjuti.
- b) Sinergi yang baik dengan instansi terkait khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam menciptakan kondisi yang kondusif di bidang kamanan dan ketertiban.

Meskipun demikian, terdapat faktor penghambat dalam melaksanakan program/kegiatan dimaksud, yakni kurangnya personil dalam penanganan aduan masyarakat.

Solusi yang dilaksanakan dalam upaya mengatasi faktor penghambat adalah memperkuat sinergi dengan aparat

Kepolisian, TNI dan Linmas Kalurahan dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah Kapanewon Seyegan.

- k. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya target kinerja tujuan “Meningkatnya Kerukunan Masyarakat” sebesar 100%, dan tercapainya target kinerja sasaran “Meningkatnya Kerukunan Masyarakat” sebesar 100%. Pencapaian indikator kinerja tujuan/sasaran didukung pula oleh tercapainya 100% (seratus persen) target kinerja indikator program yakni Presentase Persentase penanganan permasalahan yang terkait isu

SARA dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%.

Faktor Pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Program sebagai berikut:

- a) Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan ASN Kapanewon Depok dalam menjaga kerukunan umat beragama sehingga menghindarkan dari permasalahan isu SARA melalui program dan kegiatan yang ada di Kapanewon Depok.
- b) Sinergi dan hubungan kerjasama yang baik antara kapanewon dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Aparat Kalurahan.
- c) Peran serta masyarakat dalam berbagai bentuk yang cukup baik seperti dukungan dan penyebaran informasi keterlibatan dalam kegiatan/dialog keagamaan, menjaga toleransi. Dan peran aktif dalam FKUB

Faktor penghambat yang memengaruhi pencapaian Cakupan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani di wilayah kapanewon diantaranya kurang memahami masyarakat luas akan adanya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Depok.

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengikuti kegiatan yang ada agar selalu terjaga kerukunan umat beragama.

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya target kinerja tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan yang Baik” sebesar 100%, dan tercapainya target kinerja sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan yang Baik” sebesar 100%. Pencapaian indikator kinerja tujuan/sasaran didukung pula oleh tercapainya 100% (seratus persen) target kinerja indikator program persentase kalurahan menetapkan Peraturan kalurahan tepat waktu dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%.

Faktor Pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Program sebagai berikut:

- a) Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh ASN terhadap pelaksanaan program/kegiatan melalui penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan melalui pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah Kalurahan dan evaluasi kinerja dalam rakor internal;
- b) Koordinasi yang baik antara Kapanewon dengan Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemerintah sehingga terwujud keselarasan tujuan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.

Meskipun demikian, terdapat faktor penghambat dalam melaksanakan program/kegiatan dimaksud, yakni:

- a) Jadwal/agenda pelaksanaan proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang padat dan saling beririsan waktu pelaksanaannya dengan kegiatan dan/atau perintah pimpinan yang lain.
- b) Kurangnya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi yang rutin disampaikan setiap bulan.

Solusi yang dilaksanakan dalam upaya mengatasi faktor penghambat sebagai berikut:

- a) melakukan penjadwalan proses perencanaan dengan lebih cermat sehingga agenda perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik
- b) Menyusun tindak lanjut terhadap hasil evaluasi yang rutin disampaikan setiap bulan.

B. PERIODE 2026-2029

Sesuai dengan dokumen perencanaan yang disusun pada renstra 2025- 2029 yang mulai berlaku tanggal 19 Agustus 2025, bahwa program, kegiatan dan subkegiatan digunakan pada dua periode renstra. Sebagai langkah efektifitas menghindari pengulangan narasi pada penyusunan laporan kinerja ini, narasi program, kegiatan dan subkegiatan hanya disampaikan pada bagian renstra 2021-2026.

3.5 CAPAIAN KINERJA ATAS TEMA PRIORITAS NASIONAL

"PENGENTASAN KEMISKINAN"

Dalam pengentasan kemiskinan Kapanewon Depok turut mendukung penuh program- program Pemerintah Kabupaten Sleman. Berikut fasilitasi yang dilaksanakan oleh Kapanewon Depok:

1. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah, Pasar Lebaran, Pendampingan dan Monev Industri Kecil (UMKM) keikutsertaan dalam Pameran Potensi Daerah oleh pelaku UMKM di wilayah Kapanewon Depok. Kegiatan tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan ekonomi di wilayah Kapanewon Depok pada khususnya. Pelaku usaha akan dapat terpacu dan eksis dalam menjalankan usahanya melalui program pembinaan dan pendampingan industri kecil. Dimana masyarakat akan lebih memiliki daya beli dalam pemenuhan kebutuhan pokok mereka melalui program pasar murah dan pasar lebaran tersebut
2. Monitoring pemutakhiran data kemiskinan ditingkat Padukuhan dan Kalurahan;
3. Monitoring pendataan dan pengelolaan data terpadu penanggulangan kemiskinan dan data pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
4. Monitoring dan evaluasi bantuan usaha ekonomi produktif untuk keluarga miskin;
5. Monitoring dan evaluasi bantuan sosial bagi lanjut usia terlantar;
6. Monitoring dan evaluasi bantuan sosial bagi penyandang difabel berat;
7. Memberikan rekomendasi bagi penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi keluarga miskin;
8. Monitoring dan memfasilitasi pelaksanaan pelatihan usaha bagi keluarga miskin;
9. Memberikan rekomendasi bagi penerima bantuan beasiswa mahasiswa miskin Sleman Pintar;
10. Monitoring dan memfasilitasi pelaksanaan pelatihan usaha bagi disabilitas/ keluarga
11. Penyaluran sembako bagi penerima manfaat; dan
12. Pembentukan Jaring Pengaman Sosial (JPS)

BAB IV

PENUTUP

4.1. SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Laporan Kinerja Kapanewon Depok Tahun 2025 menyajikan keberhasilan tujuan/sasaran Kapanewon Depok serta perkembangan kinerja tahun sebelumnya yang terlihat dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian tujuan dan sasaran telah menunjukkan perkembangan yang baik, hal ini terlihat dari seluruh Indikator tujuan/sasaran tercapai 100%. Capaian kinerja Kapanewon Depok tahun 2025 Secara keseluruhan dinyatakan “berhasil”, karena capaian rata-ratanya sebesar 100%.

Tujuan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang tercapai menggambarkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kapanewon Depok semakin baik dari tahun ketahun. Tujuan dan sasaran lainnya telah mencapai batas maksimal, hal ini sangat baik mengingat tahun 2025 merupakan tahun kelima (terakhir) implementasi rencana strategis Kapanewon Depok 2021-2026 dan merupakan tahun pertama implementasi rencana strategis Kapanewon Depok 2025-2029.

Terkait dengan hasil rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi kinerja tahun 2024, sesuai surat Inspektur Kabupaten Sleman Nomor 700/35/F/2025 tanggal 24 April 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Depok bahwa tidak terdapat catatan kekurangan untuk perbaikan sehingga tidak ada tindak lanjut perbaikan. Di tahun yang akan datang Kapanewon Depok berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan publik guna mendukung pencapaian kinerja tujuan sebagaimana Renstra Kapanewon Depok 2021-2026.

4.2 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2024

A. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kemenpan Sementara Tahun

2025

Rencana Aksi telah disusun mengacu pada Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2024 dan telah diimplementasikan sesuai dengan target pelaksanaannya. Berikut Matriks Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi SAKIP

Tabel 4.1 Matrik Tindak Lanjut LHE SAKIP Kemenpan RB Tahun 2024

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindaklanjuti	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status Progres Penyelesaian s.d Triwulan 4 Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TL LHE AKIP Sementara Tahun 2025 (TW II)								
1.	Perencanaan Kinerja	RPJMD serta pohon kinerja sebagai kertas kerja pendukung perencanaan kinerja masih dalam proses penyusunan, sehingga belum dapat dinilai kualitasnya secara menyeluruh, oleh karenanya, pada rancangan RPJMD juga masih ditemukan catatan dalam hal hubungan kelogisan kinerja (<i>logical framework</i>)	Menyelesaikan proses rancangan perencanaan kinerja daerah maupun perangkat daerah, dan memastikan bahwa perencanaan kinerja yang disusun telah mengacu pada kaidah atau ketentuan yang berlaku, dan menggambarkan kualitas yang baik (berorientasi hasil)	Menyusun Pohon Kinerja level Perangkat Daerah dan Renstra	Tersedia pohon kinerja perangkat daerah dan dokumen Renstra yang ditetapkan	s.d. 19 Agustus 2025	Kapanewon Depok dikoordinasikan oleh Bappeda Kab Sleman	telah selesai dengan bukti dukung sebagai berikut: https://drive.google.com/drive/folders/12eJ1qsRzfgYn5FMPbt1_7kjX9CQjaG5?usp=sharing

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindaklanjuti	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status Progres Penyelesaian s.d Triwulan 4 Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Pengukuran Kinerja	Dokumen IKU (pemda dan perangkat daerah) yang telah disusun dan disampaikan melalui ESR belum memberikan informasi yang lengkap, detail dan spesifik. Informasi yang disampaikan hanya berupa uraian dan target, tidak ada informasi sumber data, formulasi perhitungan maupun definisi operasional. Kondisi Tersebut akan memberikan dampak terhadap kurangnya informasi dalam proses pengukuran kinerja.	Meningkatkan kualitas dokumen IKU dengan memberikan informasi yang lengkap, detail, dan spesifik terkait dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data target kinerja, serta alasan pemilihan IKU	Menyempurnakan format IKU dalam dokumen Renstra dengan memastikan telah memuat definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data target kinerja, serta alasan pemilihan IKU.	Struktur IKU dalam Renstra telah dilengkapi dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data target kinerja, serta alasan pemilihan IKU.	RPJMD s.d. 19 Agustus 2025 Renstra s.d. 18 September 2025	Kapanewon Depok dikoordinasikan oleh Bappeda Kab Sleman	Penyempurnaan struktur IKU dalam Renstra: https://drive.google.com/drive/folders/12eJ1qsRzfgfYn5FMPbt1_7kjX9CQjaG5?usp=sharing dan menindaklanjuti SE No. 0729 Tahun 2024 tentang Laporan Implementasi BPS Tahun 2024, Profil RB Tahun 2024, dan LKJIP Tahun 2025.



	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindaklanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status Progres Penyelesaian s.d Triwulan 4 Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Pelaporan Kinerja	Laporan kinerja level PD sudah diperbaiki secara format dengan memuat berbagai informasi mengenai capaian kinerja, analisis perbandingan kinerja, dan faktor pendukung atau penghambat kinerja. Namun masih terdapat beberapa PD yang belum menyampaikan secara detail berbagai informasi tersebut	Memastikan format laporan kinerja seluruh PD telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, dan informasi yang disampaikan detail serta berkualitas menggambarkan kondisi kinerja organisasi	1. mengikuti Rakor Persiapan Evaluasi SAKIP 2025 dan Penyiapan LKJIP 2025 dengan Tim SAKIP Kab dan Perangkat Daerah; 2. menggunakan Kerangka LKJIP perangkat daerah yang telah disusun oleh koordinator aspek pelaporan kinerja (Bag Org Setda) sbg panduan penyusunan LKJIP perangkat daerah 2025; 3. menyusun paparan (resume implementasi) SAKIP tahun 2024-2025 untuk evaluasi SAKIP 2025.	Agustus 2025	12 Agustus 2025, di Aula Lantai 3 Setda Kab Sleman	Bag Organisasi Setda Kab Sleman	Telah memeriksa kelengkapan analisis dalam dokumen laporan kinerja perangkat daerah, dan untuk memperbarui unggahan pada esr.menpan.go.id

o	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindakanjuit	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status Progres Penyelesaian s.d Triwulan 4 Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Evaluasi Internal	Belum seluruh LHE akuntabilitas kinerja internal PD diunggah ke dalam Hasil Evaluasi SAKIP - PORTALRB https://E-SAKIP.Reviu (hanya terdapat 19 data LHE PD)	Segera melaksanakan evaluasi atas implementasi AKIP PD tahun 2024, menyampaikan hasil evaluasi (dalam bentuk laporan hasil evaluasi) kepada PD, dan mendorong PD agar menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Selanjutnya Inspektorat melalui APIP atau tim evaluator internal perlu untuk melihat hasil tindak lanjut sebagai dasar dari penilaian evaluasi AKIP internal di tahun 2024	1. Evaluasi atas implementasi AKIP PD tahun 2024 2. Menyampaikan hasil evaluasi (dalam bentuk laporan hasil evaluasi) kepada PD 3. Mendorong PD agar menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut	Evaluasi tersampaikan kepada 46 PD dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sebagaimana hasil catatan dan rekomendasi yang diberikan	TW I - TW III 2025	Tim Evaluator Internal - Inspektorat Kab Sleman	1. Evaluasi atas Implementasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Inspektorat kepada 46 PD sesuai Surat Tugas: - Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Sleman Nomor 700/325/F tanggal 10 Maret 2025 - Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Sleman Nomor 700/356/F tanggal 10 Maret 2025 - Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Sleman Nomor 060/429/F tanggal 08 April 2025 - Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Sleman Nomor 060/430/F tanggal 08 April 2025 2. Hasil evaluasi telah disampaikan kepada seluruh perangkat daerah. Adapun bukti penerimaan adalah sebagai berikut https://bit.ly/BuktiPenerimaanLHE 3. Inspektorat menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE Internal Tahun 2024 (dokumen berupa Matrik Rencana Aksi)

No	Aspek Penilaian Kinerja	Catatan	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi Tindaklanjuti	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status Progres Penyelesaian s.d Triwulan 4 Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				4. Kapanewon Depok mengunggah LHE AKIP Internal ke https://esr.menpan.go.id/ (e- SAKIP REVIU) 5. Kapanewon Depok nmelakukan tindak lanjut atas LHE AKIP Internal	LHE AKIP Internal terunggah ke https://esr.menpan.go.id (portal e-SAKIP REVIU) dan selesai ditindaklanjuti	s.d September 2025	Kapanewon Depok	4. LHE AKIP Internal Kapanewon Depok telah diunggah ke https://esr.menpan.go.id (portal e-SAKIP REVIU) sesuai bukti unggah/screenshot terlampir

4.3. TINDAK LANJUT LHE INSPEKTORAT KABUPATEN

Berdasarkan Surat Inspektorat Kabupaten Sleman nomor 700/35/F /2025 tanggal 24 April 2025 hal Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, Kapanewon Depok telah menindaklanjutinya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2 Matrik Tindak Lanjut LHE Inspektorat

MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI LKjIP KAPANEWON DEPOK TAHUN 2024

No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
Rekomendasi						
1	Pertahankan kinerja yang sudah tercapai.	Kapanewon Depok berkomitmen terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024, dengan rfi,, 1. Melaksanakan dan mendokumentasikan seluruh proses SAKIP. 2. Mempedomani tujuan dan sasaran organisasi, sesuai dengan target yang telah direncanakan. 3. Melakukan monitoring secara periodik atas capaian kinerja yang akan dicapai. 4. Mengembangkan inovasi, baik berkaitan dengan praktek penyelenggaraan pelayanan publik maupun tata kerja pemerintahan.	Tahun 2025	Tahun 2025	Kapanewon Depok	Proses pelaksanaan

Catatan						
1	Terdapat SE dari Bappeda Sleman sebagai Pedoman Teknis Penyusunan Perencanaan Kinerja tiap tahun. Terdapat Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja (PK), DPA.					
2	Dokumen perencanaan kinerja telah disahkan dan ditandatangani pejabat yang berwenang. PK telah dipublikasikan tepat waktu melalui https://depok.slemankab.go.id/ , Rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas Indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART, Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat Perjanjian Kinerja berjenjang (semua pejabat struktural dari eselon 3 sampai eselon 4); SKP staf, e-kinerja.					
3	Anggaran telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, aktifitas relevan dengan kinerja yang ingin dicapai, terdapat rencana aksi, terdapat pengendalian dan evaluasi kinerja yang mempertimbangkan kinerja tahun sebelumnya.					
4	SOP Pengumpulan Data Capaian Kinerja telah ditetapkan, terdapat definisi operasional untuk pengukuran kinerja, dan pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dalam e-SAKIP.					
5	Pengukuran kinerja telah menjadi dasar pembedan/pengurangan tunjangan penghasilan, pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan struktural maupun fungsional, mempengaruhi strategi, kebijakan, aktivitas, penyesuaian anggaran dan hasil pengendalian dan evaluasi yang					

No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
	dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman melalui aplikasi SIMDALEV. Pengukuran capaian kinerja menggunakan aplikasi e-SAKIP. Terdapat efisiensi atas penggunaan sumber daya.					
6	Pengukuran kinerja telah menjadi dasar pemberian/pengurangan tunjangan penghasilan, pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan struktural maupun fungsional, mempengaruhi strategi, kebijakan, aktivitas, penyesuaian anggaran dari hasil pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda. Terdapat efisiensi atas penggunaan sumber daya.					
7	Laporan kinerja telah disusun secara berkala, diformalkan, direviu, dan telah disampaikan tepat waktu, dan dipublikasikan di website https://depok.slemakab.go.id/					
8	Laporan kinerja disusun sesuai dengan standar, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan telah mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja; menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan; telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah; telah menginformasikan perbandingan kinerja dengan realisasi tahun sebelumnya; telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya; Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja; Laporan kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).					
9	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan; Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja; Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk					

No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
	mencapai kinerja; Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja; Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya; dan Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.					
10	Pedoman evaluasi internal sudah ada, evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh perangkat daerah; dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berjenjang, mengacu kepada Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.					
11	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).					

12	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti; terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal; Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja; Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja; dan Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.				
13	Laporan kinerja telah menyajikan realisasi IKU dan PK				

No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
14	Terdapat target IKU dan PK telah tercapai, bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.					
15	Capaian Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya					

Depok, 20 Mei 2025
Panewu Depok



DJOKO MULJANTO, SP
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19680327 199803 1 006

4.3.LANGKAH KAPANEWON DEPOK DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA MASA MENDATANG

Dalam hal mewujudkan pelaksanaan kinerja tahun 2026 yang lebih baik, Kapanewon Depok telah Menyusun strategi yang akan diterapkan dalam tahun anggaran 2026 dan masa mendatang diantaranya melalui:

- 1) Menyesuaikan target kinerja agar lebih terukur;
- 2) Mengembangkan inovasi yang mempermudah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengikutsertakan dalam bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, workshop dan lainnya.
- 4) Melakukan analisis jabatan agar terwujud kesesuaian antara ketugasan dengan jumlah pegawai;
- 5) Terus meningkatkan kerjasama dalam mendukung ketentraman dan ketertiban;
- 6) Melakukan koordinasi serta pendampingan dengan kalurahan dalam berbagai bidang untuk memastikan berbagai program dan kegiatan berjalan dengan baik;
- 7) Melakukan evaluasi berkala terkait dengan capaian kinerja sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dimasa selanjutnya.

Untuk memperkuat langkah strategis tersebut, Panewu Depok telah mewujudkannya dalam dokumen Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2025, Pakta Integritas dan SKP 2026 yang dapat diakses melalui :
https://drive.google.com/file/d/1_HEfSLQpjDeFEmoggs2Q9ZDCs6d-S4NG/view?usp=drive_link

**TERBAIK I PADA EVALUASI KINERJA KAPANEWON
KATEGORI PERKOTAAN TAHUN 2025**



**JUARA II GISA AWARD TAHUN 2025
KABUPATEN SLEMAN**



DAFTAR PRESTASI 2025

No	JENIS PRESTASI	PENERIMA
	PENGANUGRAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DIY.	KAPANEWON DEPOK
	JUARA I KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TINGKAT DIY TAHUN 2025	KALURAHAN CONDONGCATUR
	JUARA III LOMBA GISA AWARD TINGKAT KABUAPTEN SLEMAN	KALURAHAN CONDONGCATUR
	JUARA I KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TINGKAT DIY	KALURAHAN CONDONGCATUR